

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)

*Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah*



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional
Universitas Gadjah Mada
(PSPPR UGM)



KATA PENGANTAR

Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Kotawaringin Barat, terselenggara atas kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Laporan Akhir ini berisi tentang hasil akhir proses penyusunan Rancangan RPKP meliputi Pendahuluan; Deskripsi dan Analisis Kawasan Perdesaan; Analisis Isu-Isu Strategis; Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; serta Program dan Kegiatan. Dokumen ini dilengkapi dengan peta deliniasi kawasan perdesaan, surat usulan dan kesepakatan kawasan perdesaan, serta peta indikasi lokasi kegiatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan kawasan perdesaan di Indonesia.

Tim Pelaksana Kerja

PSPPR UGM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan	1-2
1.3 Landasan Hukum	1-2
1.4 Proses Penetapan Kawasan Perdesaan	1-3
BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN	2-1
2.1 Delineasi Kawasan	2-1
2.2. Fisik Dasar	2-3
2.2.1 Luas dan Batas Wilayah	2-3
2.2.2 Topografi dan Curah Hujan	2-3
2.2.3 Penggunaan Lahan	2-4
2.2.4 Kebencanaan.....	2-5
2.3 Sosial Budaya dan Kependudukan	2-5
2.3.1 Jumlah Penduduk	2-5
2.3.2 Pertumbuhan Penduduk.....	2-6
2.3.3 Komposisi Penduduk	2-6
2.3.4 Sosial Budaya Penduduk	2-6
2.4 Ekonomi.....	2-7
2.5 Sarana dan Prasarana	2-10
2.5.1 Sarana Pendidikan	2-10
2.5.2 Sarana Kesehatan	2-11
2.5.3 Sarana Ekonomi.....	2-11
2.5.4 Sarana Produksi.....	2-12
2.5.5 Sarana Sosial Budaya	2-12
2.5.6 Sarana Pemerintahan.....	2-13
2.5.7 Sarana dan Prasarana Transportasi	2-13
2.5.8 Sarana dan Prasarana Energi	2-13
2.5.9 Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi.....	2-14
2.5.10 Sarana dan Prasarana Air Bersih.....	2-14

2.5.11 Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sistem Manajemen Air	2-14
2.5.12 Sarana dan Prasarana Sanitasi	2-15
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	3-1
3.1 Potensi dan Permasalahan	3-1
3.2 Kluster Komoditas dan Pendukung	3-2
3.3 Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3-5
3.4 Isu Strategis	3-11
3.5 Analisis Sinergisme.....	3-13
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	4-1
4.1 Tujuan	4-1
4.2 Sasaran.....	4-3
4.3 Strategi	4-5
4.4 Arah Kebijakan	4-5
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN	5-1
5.1 Matriks Program dan Kegiatan	5-1
5.2 Indikator Capaian Kegiatan	5-6
5.3 Kebutuhan Pendanaan	5-8
LAMPIRAN	
Peta Delineasi Kawasan Perdesaan	
Peta Orientasi Lokasi Kawasan Perdesaan	
Surat Usulan Kawasan Perdesaan	
Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan	
Surat Keputusan Bupati tentang TKPKP	
Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan	
Rancangan Peraturan Bupati tentang RPKP (<i>dalam Proses</i>)	
Peta Indikasi Lokasi Kegiatan Kawasan Perdesaan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai IDM dan IPD Desa-Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat	2-1
Tabel 2.2	Luas Kawasan Perdesaan Tahun 2015 Menurut Desa/Kelurahan	2-3
Tabel 2.3	Jarak Kawasan Perdesaan Ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten	2-3
Tabel 2.4	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Di Stasiun Metereologi Pangkalan Bun Tahun 2015	2-4
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Tahun 2015 Menurut Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata (Ha)	2-4
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Tahun 2015 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata ...	2-5
Tabel 2.7	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015 Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-5
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-6
Tabel 2.9	Komposisi Penduduk Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin dan Rasio di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-6
Tabel 2.10	Banyaknya Guru, dan Murid Tahun 2015 Menurut Jenjang Pendidikan dan Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-7
Tabel 2.11	Jumlah Kasus DBD, Diare, TB, Pneumonia, dan Malaria Tahun 2015 Menurut Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-7
Tabel 2.12	Jumlah Rumah Tangga Dan Luas Tanaman (Ha) Padi Sawah dan Kelapa Tahun 2015 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-8
Tabel 2.13	Jumlah Rumah Tangga Dan Luas Tanam (Ha) Jagung dan Kedelai Tahun 2013 Menurut Desa/Kelurahan Di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-8
Tabel 2.14	Jumlah Rumah Tangga dan Luas Tanam (Ha) Ubi-ubian Menurut Desa/ Kelurahan Tahun 2013 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-8
Tabel 2.15	Jumlah Populasi Unggas, dan Sapi Tahun 2013 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-9
Tabel 2.16	Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya dan Penangkapan Ikan Tahun 2013 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-10
Tabel 2.17	Banyaknya Fasilitas Pendidikan Sekolah Tahun 2015 Menurut Tingkat Pendidikan Di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-10
Tabel 2.18	Jumlah Sarana Perdagangan Tahun 2014 Menurut Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-12

Tabel 3.1	Potensi dan Masalah Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Berdasarkan Aspek Fisik Dasar, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Sarana Prasaran	3-1
Tabel 3.2	Klaster Komoditas, Klaster Pendukung, dan Sasaran Klaster.....	3-2
Tabel 3.3	Penelaahan Dokumen Perencanaan	3-6
Tabel 4.1	Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat	4-6
Tabel 5.1	Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat	5-2
Tabel 5.2	Indikator Capaian Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat	5-6
Tabel 5.3	Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat	5-9
Tabel 5.4	Matriks Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat	5-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat.....	2-2
Gambar 2.2	Penggunaan Lahan Dominan di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata	2-4
Gambar 2.3	Peternakan Sapi sebagai Populasi Ternak Terbesar	2-9
Gambar 2.4	Posyandu Harum Selati Desa Kubu	2-11
Gambar 2.5	Balai Pertemuan dan Lapangan Desa	2-12
Gambar 2.6	Kantor Desa Kubu dan Sabuai Timur	2-13
Gambar 2.7	Jalan Aspal Desa Kubu dan Jalan Tanah Desa Sabuai	2-13
Gambar 2.8	Sarana pembangkit listrik Tenaga Listrik Desa Sungai Bakau, dan Sabuai	2-14
Gambar 2.9	Tempat Sampah di Desa Sabuai Timur	2-15
Gambar 3.1	Hasil Integrasi Sapi-Sawit Berupa Pupuk dan Tanaman Holtikultura	3-4
Gambar 3.2	Pohon Ujung Atap di Desa Keraya	3-5
Gambar 3.3	Penanganan Abrasi di Desa Kubu dan Desa Sabuai Timur	3-5
Gambar 3.4	Analisis Sinergitas Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat.....	3-15

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urgensi pembangunan desa dan kawasan perdesaan seperti yang diamanatkan dalam NAWACITA, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. NAWACITA bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan kota-desa yang akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 sampai Tahun 2019, disebutkan bahwa pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Untuk itu, target sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2015-2019 adalah mengurangi 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan sedikitnya 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai peraturan pelaksanaannya seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan turunan lainnya, melalui diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka legalitas dan acuan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan semakin lengkap.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 83, menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan meliputi: a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan amanat ini, maka perlu disusun Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah,

potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana yang mendukung, usulan dari pemerintah desa, maupun rencana dan program pembangunan kabupaten/kota/desa di masa mendatang (RPJM Daerah dan RPJMDesa) dan RTRW Kabupaten/Kota. Proses tersebut merupakan bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan terhadap desa dan Kawasan Perdesaan.

Pada tahun 2016, Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan memfasilitasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penetapan Kawasan Perdesaan dan penyusunan rancangan RPKP masing-masing kawasan sebagai hasil kesepakatan bersama masyarakat, pemerintahan desa, dan pemerintahan daerah. Penyusunan rancangan RPKP tersebut dilakukan melalui pendekatan rencana yang disusun menjadi menyeluruh, terpadu dan komprehensif, dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Selanjutnya rancangan RPKP tersebut diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten sebagai bahan pengusulan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi RPKP. RPKP ini akan menjadi acuan dalam menyusun program aksi tahunan berikutnya bagi seluruh SKPD terkait dalam menyusun rencana teknis yang lebih detail (*detail engineering design/DED*) maupun bisnis plan sesuai komoditi yang akan dikembangkan. RPKP ini sekaligus akan menjadi landasan kerja bagi pelaksana kegiatan unit kerja lain Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan khususnya, dan umumnya bagi unit kerja lain di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian/Lembaga terkait.

1.2. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. Menyusun rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagai bahan masukan bagi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten untuk diusulkan kepada Bupati menjadi RPKP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- c. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

- d. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke-dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- i. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- l. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; dan
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.

1.4. Proses Penetapan Kawasan Perdesaan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Tujuan dari pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas

pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pendekatan partisipatif ini merupakan salah satu kunci pembangunan kawasan perdesaan dapat berhasil.

Dalam menentukan lokus kawasan perdesaan, diarahkan pada kawasan yang sudah ditetapkan menjadi lokus prioritas yang bersumber dari : i) 39 Pusat Pertumbuhan Baru (keterkaitan Kota Desa) yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019; ii) Kawasan Perdesaan yang telah diinisiasi oleh Kementerian/Lembaga (P2KPB, PKPBM, KTM, Agropolitan, Minapolitan, dll) atau Kawasan Perdesaan Tertentu, dan iii) Kawasan Perdesaan yang diusulkan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) meliputi 72 (tujuh puluh dua) Kabupaten/Kota di wilayah I sampai V yang masuk wilayah kerja Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu perguruan tinggi yang diberi tugas untuk ikut mendampingi dalam penyusunan Rancangan RPKP di 9 (sembilan) Kabupaten yang masuk wilayah III (Kalimantan). Lokasi kawasan perdesaan dari 9 (sembilan) Kabupaten ini dipilih berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Proses penetapan kawasan perdesaan agro-mina-wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan melalui rapat koordinasi antarSKPD dengan Bupati Kotawaringin Barat, dan pemerintah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan desa-desa yang pilih menjadi kawasan perdesaan, yaitu Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, Desa Keraya, Desa Sabuai Timur, dan Desa Sabuai yang termasuk desa-desa di Kecamatan Kumai. Alasan pemilihan desa-desa tersebut ialah desa-desa tersebut masuk dalam rencana pengembangan kawasan kota baru. Visi Kabupaten Kotawaringin Barat ialah Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera, berkeadilan, dan jaya. Misi Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

1. melanjutkan pembangunan Kotawaringin Barat sebagai daerah pengembangan pembangunan
2. memperkuat dimensi keadilan di semua bidang
3. menuju kejayaan Kotawaringin Barat

Prioritas Kabupaten Kotawaringin Barat ialah menjadikan pembangunan merata di semua bidang, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan yang menjadi keunggulan wilayah pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Sehingga analisis lapangan memerlukan pengamatan komprehensif terhadap pariwisata, pertanian, dan perikanan.

Bersamaan dengan penetapan lokasi kawasan perdesaan, dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BAPPEDA, dan Kepala Dinas/SKDP, Camat serta Kepala Desa yang wilayahnya masuk dalam kawasan perdesaan.

Rapat koordinasi dilaksanakan beberapa kali untuk menentukan lokasi RPKP. Awalnya desa-desa yang masuk dalam kegiatan RPKP bukan desa-desa yang saat ini telah ditetapkan menjadi kawasan perdesaan, melainkan desa-desa lain yang lokasinya terpencar meskipun masih dalam satu Kecamatan Kumai, desa-desa yang dulu sempat dipilih ialah desa Batu Belaman, Sungai Cabang, Sungai Tendan, Sungai Bedaun, dan Bumi Harjo. Namun, kemudian

TKPKP Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, Desa Keraya, Desa Sabuai Timur, dan Desa Sabuai sebagai kawasan perdesaan. Oleh karena itu, tim Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR) Universitas Gadjah Mada melakukan koordinasi bersama dengan TKPKP untuk memaparkan potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan masalah yang dapat diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan serta berdasarkan potensi dan masalah menentukan prioritas pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Hasil pengumpulan informasi umum yang didapatkan dari rapat SKPD kemudian dibawa sebagai bahan yang akan didiskusikan dalam *focus group discussion* tingkat desa. Kegiatan *focus group discussion* tingkat desa dilaksanakan di kantor Kecamatan Kumai, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di kawasan perdesaan tentang rencana pembangunan kawasan perdesaan yang mereka harapkan termasuk di dalamnya mengajak masyarakat (yang diwakili oleh Kepala desa dan tokoh masyarakat).

Masyarakat diajak untuk membayangkan kondisi terbaik jika terdapat perencanaan pembangunan di kawasan perdesaan dan kondisi terburuk jika potensi dan masalah yang ada di kawasan perdesaan tidak ditangani dengan baik. Hasil imajinasi dituangkan dalam grafis dan selanjutnya didiskusikan sehingga didapatkan informasi-informasi tambahan mengenai harapan masyarakat terhadap kegiatan yang sebaiknya dilakukan untuk memecahkan/menyelesaikan masalah dan mengelola potensi kawasan perdesaan.

Rapat dan Presentasi Temuan Sementara FGD dan Survei dengan TKPKP Kabupaten Kotawaringin Barat dibuka oleh Kepala Bappeda sebagai bagian dari anggota TKPKP dengan harapan hasil temuan dan amatan di lapangan menjadi lengkap. Tujuan umum rapat ini untuk mengintegrasikan aspirasi maupun kebutuhan dari masyarakat sebagai perwujudan “Desa Membangun” dengan rencana pemerintah daerah untuk “Membangun Desa” melalui agenda pembangunan kabupaten, agar keduanya saling mendukung untuk mencapai manfaat yang besar bagi masyarakat.

BAB 2

DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, desa-desa dapat digolongkan menjadi desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. IDM diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sementara itu IPD diukur berdasarkan lima aspek yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kawasan Perdesaan di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari enam desa yang mayoritas tergolong sebagai desa berkembang berdasarkan IDM maupun IPD. Berikut ini merupakan tabel IDM dan IPD desa-desa di Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.1
Nilai IDM dan IPD Desa-Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat

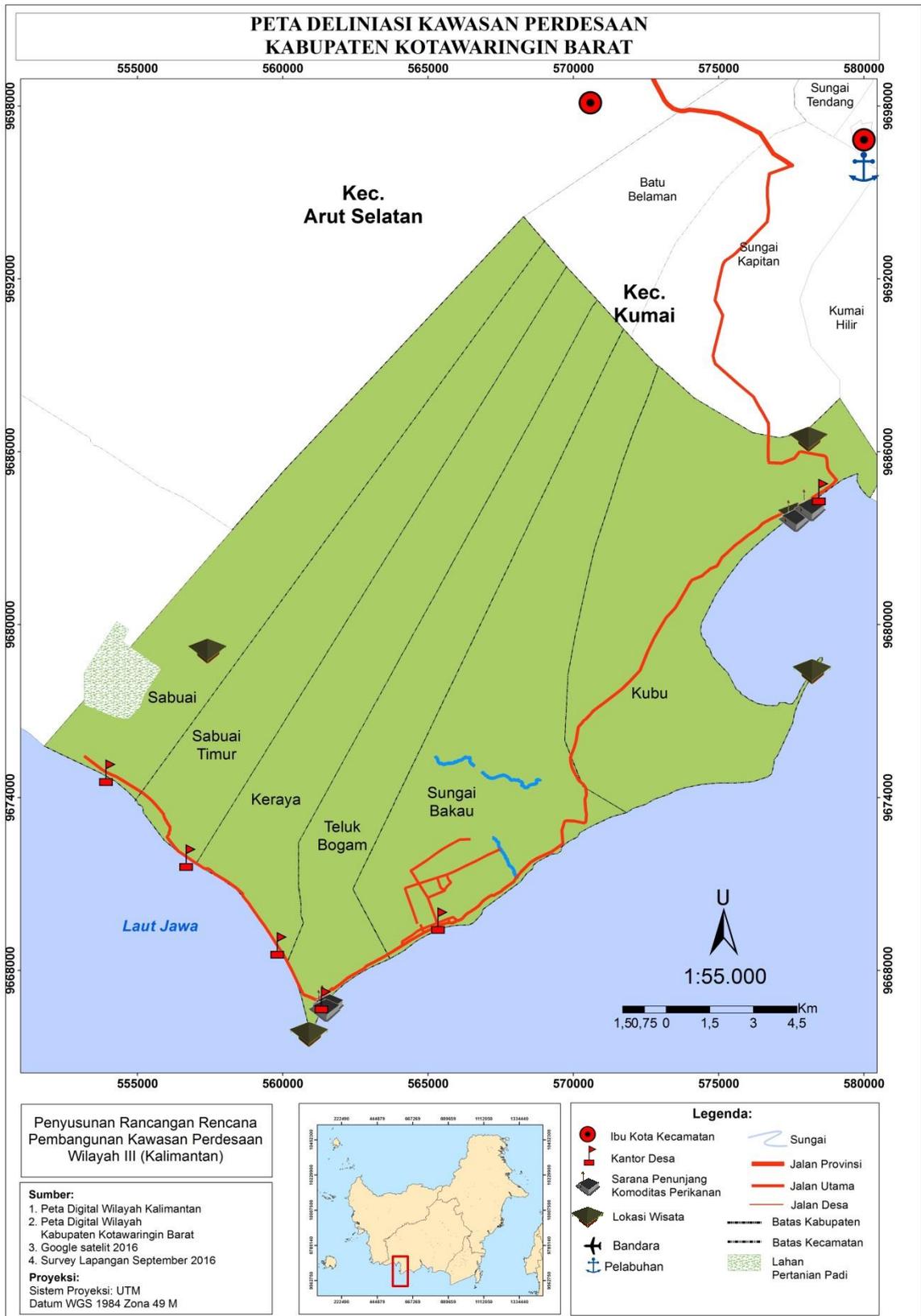
Desa	IPD	Status	IDM	Status
Sabuai	60,31	Berkembang	0,5270	Tertinggal
Sabuai Timur	-	-	-	-
Keraya	65,71	Berkembang	0,6939	Berkembang
Teluk Bogam	66,89	Berkembang	0,7069	Berkembang
Sungai Bakau	59,79	Berkembang	-	-
Kubu	69,01	Berkembang	-	-

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan IDM maka Desa Sabuai masuk dalam kategori tertinggal dengan demikian secara keseluruhan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan perdesaan belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Desa Keraya, dan Teluk Bogam menunjukkan perkembangan kondisi sosial ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik dibandingkan empat desa lainnya. Sementara itu, berdasarkan IPD maka 5 (lima) desa tergolong desa berkembang hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kondisi sarana pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa sudah mencukupi. Kondisi Kawasan Perdesaan di Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat secara lebih jelas dijabarkan dalam sub bab berikut ini yang terdiri dari fisik dasar, kependudukan, ekonomi, serta sarana dan prasarana.

2.1 Deliniasi Kawasan

Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kecamatan Kumai terdiri dari enam desa. Kawasan perdesaan memiliki satu jalan utama yang berurutan, berdasarkan kedekatan dengan kecamatan desa tersebut berturut-turut ialah Desa Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam, Keraya, Sabuai Timur, dan Sabuai.



Gambar 2.1
Peta Delineasi Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata
Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber: Analisis, 2016

2.2 Fisik Dasar

2.2.1 Luas dan Batas Wilayah

Kecamatan Kumai merupakan bagian dari Kabupaten Kotawaringin Barat yang terletak di wilayah khatulistiwa. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kawasan perdesaan dengan tema agropolitan dan minapolitan. Luas wilayah kawasan perdesaan yang terdiri dari Desa Sabuai Timur, Sabuai, Keraya, Teluk Bogam, Sungai Bakau dan Kubu ialah 490 Km², atau 4,55% dari keseluruhan luas Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 2.2
Luas Kawasan Perdesaan Tahun 2015 Menurut Desa/Kelurahan

Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Terhadap Luas Kecamatan	Persentase Luas Terhadap luas kabupaten	Tinggi Daerah (mdpl)
Sabuai	97	3,32	0,90	2
Keraya	78	2,67	0,72	2
Teluk Bogam	82	2,81	0,76	3
Sungai Bakau	111	3,80	1,03	11
Kubu	122	4,18	1,13	1

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Desa Kubu memiliki jarak paling dekat terhadap pusat Kecamatan Kumai di Desa Kumai Hilir. Jarak Desa Kubu terhadap Ibukota Kecamatan ialah 21,7 Km, sedangkan jarak Desa Sabuai dengan Ibukota Kecamatan paling jauh yaitu 63,2 Km. Desa Kubu dan Keraya merupakan Desa yang paling banyak dilalui sungai dibanding desa lain di kawasan perdesaan, sungai yang melintasi Desa Kubu ialah Sungai Bakau, Sungai Baru Besar, Sungai Baru Kecil, Sungai SD, Sungai Muksin, sedangkan sungai yang melintasi Desa Keraya ialah Sungai Sentosa, Sungai Benipah, Sungai Batu, Sungai Pemancingan, Sungai Amang Besar, Sungai Amang Kecil.

Tabel 2.3
Jarak Kawasan Perdesaan Ke Ibukota Kecamatan dan Ibukota Kabupaten

Kecamatan	Desa	Jarak Ke Ibukota Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kabupaten
Kumai	Sabuai	63,2	78,2
	Keraya	60	75
	Teluk Bogam	50	70
	Sungai Bakau	45	52
	Kubu	21,7	36,7

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

2.2.2 Topografi dan Curah Hujan

Kawasan Perdesaan di Kecamatan Kumai berada pada satuan morfologi dataran hingga satuan berelief agak kasar, yaitu antara 0 - 40%, dan berbatasan langsung dengan laut dengan tinggi daerah antara 1 mdpl hingga 30 mdpl yang terdiri dari danau dan rawa aluvial/organosol yang banyak mengandung air. Kondisi ini disebabkan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak sungai, dan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Rata-rata curah hujan pada tahun 2015 sebesar 191,41mm/hh dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan sebesar 15 hari/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 511 mm, dan hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan Januari sebanyak 29 hari.

Tabel 2.4
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan
di Stasiun Metereologi Pangkalan Bun Tahun 2015

Bulan	Jumlah Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
Januari	29	219,8
Februari	15	325,8
Maret	24	263,6
April	18	353,3
Mei	17	239,8
Juni	17	97,5
Juli	11	56,4
Agustus	5	12,6
September	2	19,5
Oktober	4	66,7
November	19	131
Desember	20	511

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

2.2.3 Penggunaan Lahan

Kawasan Perdesaan di Kecamatan Kumai memiliki dominasi penggunaan lahan berupa perkebunan dan hutan produksi. Hanya sebagian kecil daerahnya yang dimanfaatkan sebagai areal pertanian, dan permukiman. Perkebunan terdiri dari kebun sawit, kebun kelapa, dan kebun tanaman ujung atap dengan total lahan 5.985 Ha. Adapun persawahan terdiri dari sawah tadah hujan yang banyak terdapat di Desa Sabuai dan Sabuai Timur, juga sebagian berada di Desa Sungai Bakau, total penggunaan lahan persawahan ialah 599 Ha.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Tahun 2015 Menurut Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata (Ha)

Desa	Penggunaan Lahan			
	Perkebunan	Persawahan	Permukiman	Lainnya
Kubu				
Sungai Bakau	850	160	60	960
Teluk Bogam	35	-	-	7.165
Keraya	150	-	26	7.624
Sabuai Timur	950	100	45	52
Sabuai	4000	339	3000	-

Sumber: RPJM Desa Tahun 2016



Gambar 2.2
Penggunaan Lahan Dominan di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Sumber: Survei lapangan, 2016

2.2.4 Kebencanaan

Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan wilayah pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut, bersifat dinamis, dan rentan terhadap perubahan lingkungan (secara alami maupun pengaruh manusia) seperti abrasi. Sebagai desa yang berbatasan langsung dengan perairan kemungkinan terjadi erosi laut sangat besar. Bencana abrasi terjadi di Desa Kubu, Teluk Bogam, Keraya, Sabuai dan Sabuai Timur.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan langkah konkrit berupa pembangunan talud, disertai peremajaan tanaman bakau, namun yang perlu diperhatikan adalah efek dari pembangunan talud menyebabkan munculnya tombolo, atau timbunan lumpur di belakang talud.

2.3 Sosial Budaya dan Kependudukan

2.3.1 Jumlah Penduduk

Penduduk sebagai salah satu komponen dalam suatu sistem wilayah yang memiliki peranan penting sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan perubahan pemanfaatan ruang melalui berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai pelaku perubahan pemanfaatan ruang, penduduk juga merupakan pihak yang akan memperoleh manfaat dari upaya-upaya penataan ruang. Dinamika kependudukan memiliki peranan penting sebagai objek sekaligus subjek dalam dinamika perkembangan wilayah. Beberapa hal yang berperan dalam kependudukan ialah kepadatan penduduk di suatu wilayah, laju pertumbuhan penduduk, serta struktur penduduk.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Tahun 2015 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Jumlah penduduk (Jiwa)		
	2013	2014	2015
Sabuai	400	403	411
Sabuai Timur	-	-	273
Keraya	490	489	501
Teluk Bogam	1269	1302	1333
Sungai Bakau	1593	1635	1674
Kubu	3522	3621	3722

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Kepadatan penduduk di Kawasan Perdesaan tahun 2015 rata-rata ialah 14 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di Desa Kubu merupakan kepadatan penduduk terpadat sebesar 31 jiwa/Km² mengingat luas wilayahnya yang sangat sempit. Sementara itu, Desa Sabuai dengan luas wilayah 97 Km², memiliki nilai kepadatan penduduk paling rendah yaitu 4 jiwa/Km².

Tabel 2.7
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2015
Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan (Jiwa/Km ²)
	Km	%	Jumlah	%	
Sabuai	97	3,32	411	0,76	4
Sabuai Timur	63,4		273		5
Keraya	78	2,67	505	0,93	6
Teluk Bogam	82	2,8	1333	2,47	16
Sungai Bakau	111	3,8	1674	3,1	15
Kubu	122	4,17	3722	6,89	31

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

2.3.2 Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai tersebar tidak merata. Desa Sabuai memiliki penduduk rata-rata 400 jiwa, sedangkan Desa Kubu memiliki jumlah penduduk lebih dari 3.500 Jiwa. Meskipun demikian laju pertumbuhan Keenam desa di Kawasan Perdesaan menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tahun 2013 ke 2014 berada di nilai 0,29% kemudian meningkat lima kali lipat di tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 0,17%.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2015 Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Laju pertumbuhan penduduk (%)	
	2013-2014	2014-2015
Sabuai	0,007	0,020
Keraya	-0,002	0,024
Teluk Bogam	0,026	0,024
Sungai Bakau	0,026	0,024
Kubu	0,028	0,028

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

2.3.3 Komposisi Penduduk

Penduduk di kawasan perdesaan Kecamatan Kumai berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penduduk laki-laki dengan jumlah 3.854 jiwa. Desa Sabuai merupakan desa dengan rasio 92,6 yang merupakan rasio terendah, jumlah penduduk laki-laki di Desa Sabuai hanya 197 jiwa. Rasio seimbang senilai 100 dimiliki oleh Desa sungai Bakau, artinya penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Sungai Bakau memiliki jumlah sama pada tahun 2015.

Tabel 2.9
Komposisi Penduduk Tahun 2015 Menurut Jenis Kelamin dan Rasio di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah	Rasio
Sabuai	197	214	411	92,6
Sabuai Timur	139	134	273	103,73
Keraya	247	258	505	95,74
Teluk Bogam	674	659	1333	102,28
Sungai Bakau	837	837	1674	100
Kubu	1899	1823	3722	104,17

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

2.3.4 Sosial Budaya Penduduk

Sebagai subjek pembangunan, potensi sumber daya manusia digunakan sebagai ujung tombak untuk mempercepat peningkatan ke arah kehidupan yang lebih baik. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, semakin cepat pula proses peningkatan kesejahteraan. Pembangunan dengan tujuan fisik tanpa diiringi dengan mempersiapkan perangkat pendukung, seperti masyarakat, utamanya masyarakat desa, hanya akan menimbulkan kesenjangan wilayah.

Potensi sumber daya manusia dapat dilihat melalui pendidikan penduduk di bangku sekolah. Tahun 2015 total murid di sekolah-sekolah kawasan perdesaan berjumlah 1.396 murid dengan Desa Kubu sebagai desa penyumbang murid terbanyak yaitu 810 murid, Desa Sabuai menjadi desa dengan jumlah murid terkecil yaitu 28 murid. Jenjang pendidikan

penduduk kawasan perdesaan didominasi oleh siswa Sekolah Dasar dengan 917 murid, 54 Guru dan tujuh sekolah.

Sumber daya manusia yang baik dilihat pula dari kesehatannya. Kesehatan penduduk kawasan perdesaan digambarkan melalui jenis penyakit yang terdapat di kawasan perdesaan Kecamatan Kumai. Jenis penyakit yang terdapat di Kawasan perdesaan terbagi menjadi penyakit demam berdarah, diare, TB, pneumonia, dan malaria. Jumlah kasus penyakit diare menempati urutan pertama dengan 25 kasus, kasus menurut data dalam angka Kecamatan Kumai tahun 2015 hanya terjadi di Desa Kubu. Diurutan kedua ialah penyakit demam berdarah dengue berjumlah dua kasus, berada di Desa Kubu, sedangkan penyakit Tb, Pneumonia, dan malaria memiliki 0 kasus di tahun 2015.

Tabel 2.10
Banyaknya Guru, dan Murid Tahun 2015 Menurut Jenjang Pendidikan dan Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	TK		SD		SMP		SMA	
	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
Sabuai	0	0	7	28	0	0	0	0
Keraya	0	0	9	60	0	0	0	0
Teluk Bogam	0	0	9	149	9	27	13	125
Sungai Bakau	0	0	5	197	0	0	0	0
Kubu	0	0	24	483	23	202	13	125

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.11
Jumlah Kasus DBD, Diare, TB, Pneumonia, dan Malaria Tahun 2015 Menurut Desa di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Agama		Etnis			
	Islam	Kristen	Melayu	Jawa	Dayak	Bugis
Sabuai						
Sabuai Timur	167	6	152	13	6	2
Keraya	505	0				
Teluk Bogam						
Sungai Bakau	1609	0	1421	141	7	33
Kubu						

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

2.4 Ekonomi

Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tahun 2015, Kecamatan Kumai termasuk daerah yang maju tetapi tertekan. Hal ini berarti bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kecamatan Kumai lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat, namun memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pembentukan Kawasan Perdesaan dengan tema agropolitan tentu tidak lepas dari keberadaan kontribusi sektor pertanian yang dilihat melalui struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang didominasi oleh kegiatan pertanian. Secara umum petani di kawasan perdesaan Kecamatan Kumai didominasi oleh pertanian pangan berupa padi sawah, padi ladang, jagung, dan kacang tanah. Pada tahun 2013 luas tanam padi sawah dan padi ladang berjumlah 513,3 Ha. Luas tanam padi sawah terbesar berada di Desa Sabuai dengan luas tanam 233,86 Ha.

Tabel 2.12
Jumlah Rumah Tangga Dan Luas Tanaman (Ha) Padi Sawah dan Kelapa Tahun 2015 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Padi Sawah		Kelapa	
	Jumlah Rumah Tangga	Luas Tanam	Jumlah Rumah Tangga	Luas Tanam
Sabuai	75	233,86	0	0
Sabuai Timur		250	0	0,007
Keraya	41	61,5	0	
Teluk Bogam	53	100	0	
Sungai Bakau	342	86,5	81	0,005
Kubu	43	31,4	0	

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Tanaman Jagung terdapat di beberapa desa Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai, luas tanamnya mencapai 0,31 Ha. Berdasarkan data Kecamatan dalam angka yang kemudian disajikan dalam tabel diketahui bahwa Desa Sabuai memiliki 3.120 rumah tangga penanam jagung, Desa Sabuai tidak memiliki rumah tangga penanam kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Sedangkan Desa-Desa lain tidak memiliki rumah tangga baik yang menanam jagung, kedelai, kacang tanah, maupun kacang hijau.

Tabel 2.13
Jumlah Rumah Tangga Dan Luas Tanam (Ha) Jagung dan Kedelai Tahun 2013 Menurut Desa/Kelurahan di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Jagung		Kedelai		Kacang Tanah		Kacang Hijau	
	Jumlah Rumah Tangga	Luas Tanam						
Sabuai	6	0,31	0	0	1	30	0	0
Sabuai Timur		0						
Keraya	0	0	0	0	0	0	0	0
Teluk Bogam	0	0	0	0	0	0	0	0
Sungai Bakau	0	0	0	0	0	0	0	0
Kubu	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Jenis ubi-ubian yang diusahakan adalah ubi kayu dan ubi jalar, dibandingkan dengan tanaman pangan jenis lainnya, luas panen ubi-ubian di Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai seluas 2,5 Ha. Jumlah rumah tangga Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai yang mengusahakan tanaman ubi-ubian ialah 20. Desa Sabuai memiliki jumlah rumah tangga penanam ubi-ubian terbanyak yaitu 11 rumah tangga, dengan luas tanam 1,5 Ha. Desa Keraya dan Teluk Bogam tidak memiliki rumah tangga penanam ubi jalar.

Tabel 2.14
Jumlah Rumah Tangga dan Luas Tanam (Ha) Ubi-ubian Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2013 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Jumlah Rumah Tangga	Luas Tanam	Jumlah Rumah Tangga	Luas Tanam
Sabuai	9	13,38	2	0,25
Keraya	0	0	0	0
Teluk Bogam	0	0	0	0
Sungai Bakau	8	0,19	0	0
Kubu	1	0,75	0	0

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

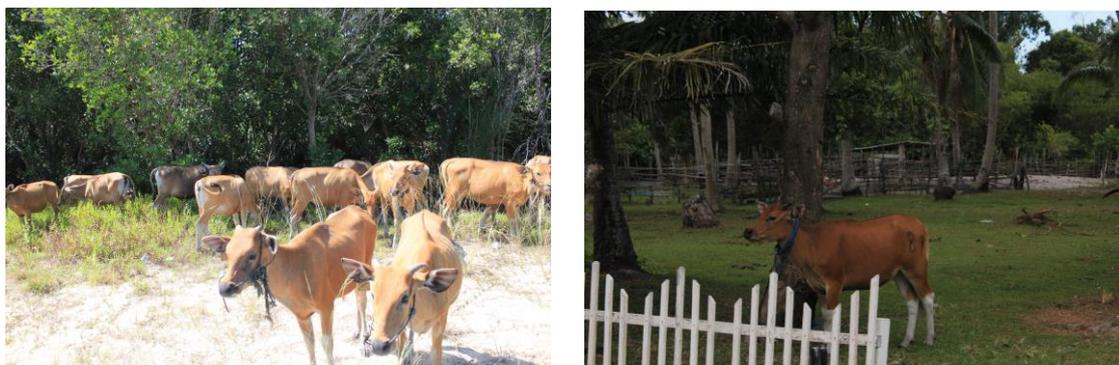
Peternakan yang berada di Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai belum dikelola secara terintegrasi, dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Namun, sektor ini telah menjadi sektor basis di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan pada RPJMD disebutkan bahwa Ayam masuk sebagai salah satu dari komoditas unggulan dalam sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sehingga diharapkan peternakan mampu berdaya saing nasional maupun international melalui peningkatan produksi dan kualitas peternakan terutama ayam kampung. Hal ini sejalan dengan hasil peternakan tahun 2013 yang menunjukkan bahwa Ayam kampung memiliki hasil produksi tertinggi kedua sejumlah 6.839 ekor terutama di Desa Sungai Bakau sebanyak 2.416 ekor, kemudian Desa Teluk Bogam dengan 1.375 ekor. Sedangkan Ayam petelor tidak diusahakan sebagai hewan ternak di Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Jenis unggas yang memiliki nilai populasi tertinggi ialah ayam pedaging dengan total 500.450 ekor, populasi terbanyak sekaligus satu-satunya berada di Desa Kubu. Populasi jenis unggas itik paling banyak berada di Desa Sungai Bakau dengan 530 ekor, dan paling sedikit berada di Desa Kubu dengan 30 ekor, dan Desa Keraya tanpa populasi itik. Jenis hewan ternak bukan unggas yang terdapat di Kawasan Perdesaan salah satunya ialah sapi. Populasi sapi terbanyak berada di Desa Sabuai dengan 130 ekor, dan populasi hewan ternak sapi paling sedikit di Desa Sungai Bakau dengan 23 ekor.

Tabel 2.15
Jumlah Populasi Unggas, dan Sapi Tahun 2013 di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Unggas				Sapi Potong
	Ayam kampung	Ayam petelor	Ayam Pedaging	Itik	
Sabuai	1188	0	0	53	130
Keraya	865	0	0	0	33
Teluk Bogam	1375	0	0	85	45
Sungai Bakau	2416	0	0	530	23
Kubu	995	0	500450	30	112

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016



Gambar 2.3
Peternakan Sapi sebagai Populasi Ternak Terbesar
Sumber: Survei Lapangan, 2016

Hasil produksi ikan budidaya dan hasil tangkapan ikan di Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa ikan budidaya yang terdiri dari jenis ikan Nila, Bandeng, dan Patin. Jenis ikan dengan nilai panaan tertinggi berurutan ialah Bandeng, Nila, dan Patin. Jumlah rumah tangga yang membudayakan ikan di Desa Sungai Bakau sebanyak delapan rumah tangga, terdiri dari tiga RT pengusaha Nila, dan lima RT pengusaha Bandeng. Namun, saat ini tambak

tersebut tidak lagi digunakan penduduk sebagai penghasilan utama, melainkan melakukan kegiatan tangkap ikan.

Jumlah rumah tangga yang memiliki usaha penangkapan di Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai ialah 672 rumah tangga. Desa Kubu menjadi desa dengan jumlah rumah tangga pengusaha ikan tangkap terbesar yakni 232 rumah tangga, disusul Desa Sungai Bakau dengan 203 rumah tangga. Kedua desa ini berbatasan langsung dengan laut sehingga lokasinya sangat mendukung bagi masyarakat yang memiliki usaha penangkapan ikan. Desa Sabuai, Keraya, dan Teluk Bogam memiliki rumah tangga pengusaha ikan tangkap relatif rendah.

Tabel 2.16
Jumlah Rumah Tangga Usaha Budidaya dan Penangkapan Ikan Tahun 2013
di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Ikan Tangkap	Ikan Budidaya
Sabuai	34	0
Sabuai Timur	*	*
Keraya	73	0
Teluk Bogam	130	1
Sungai Bakau	203	8
Kubu	232	4

Ket: *data belum tersedia

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

2.5 Sarana dan Prasarana

2.5.1 Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan formal atau sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ketersediaan sarana pendidikan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan tabel bahwa keberadaan sekolah dapat ditemui di masing-masing kecamatan. Semakin banyak sekolah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, kemudahan mencapai sarana pendidikan semakin mudah dan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sadar akan pendidikan usia dini.

Sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar mendominasi dengan tujuh bangunan, terbanyak berada di Desa Kubu yang berjumlah tiga, dan sekolah untuk tingkat pendidikan TK 0 bangunan, SMP dengan tiga Bangunan, dan SMA dua bangunan. Desa yang memiliki jumlah sarana pendidikan cukup lengkap ialah Desa Kubu.

Tabel 2.17
Banyaknya Fasilitas Pendidikan Sekolah Tahun 2015
Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Tingkat Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
Sabuai	1	0	0
Keraya	1	0	0
Teluk Bogam	1	1	1
Sungai Bakau	1	0	0
Kubu	3	2	1
Jumlah	7	3	2

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

2.5.2 Sarana Kesehatan

Kesehatan merupakan hal penting dalam pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat kesehatan yang tinggi akan mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Tingkat kesehatan yang tinggi juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai. Jika fasilitas kesehatan kurang memadai, maka daya layan yang akan diberikan juga akan kurang sehingga pengobatan yang dilakukan kepada masyarakat kurang optimal.



Gambar 2.4
Posyandu Harum Selati Desa Kubu
Sumber : survei lapangan, 2016

Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai tidak memiliki rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, puskesmas dan polindes, namun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, desa memiliki sarana kesehatan lain seperti puskesmas pembantu, posyandu, klinik, poskesdes, dan pos pelayanan keluarga berencana desa (PPKBD). Puskesmas Pembantu hanya satu yaitu di Desa Kubu. Keberadaan posyandu di Desa Kubu terdapat satu, dan digunakan secara berkala oleh penduduk. Polindes hanya terdapat satu di Desa Kubu. Keberadaan pos pelayanan keluarga berencana desa tersebar merata masing-masing satu PPKBD untuk meningkatkan angka harapan hidup bayi dan ibu melahirkan.

2.5.3 Sarana Ekonomi

Salah satu tempat terjadinya kegiatan ekonomi masyarakat adalah pasar. Namun, seluruh desa di Kawasan Perdesaan Kecamatan Kumai tidak memiliki pasar, baik pasar permanen atau semi permanen maupun pasar tanpa bangunan. Meskipun tidak memiliki pasar, namun desa-desa memiliki prasarana ekonomi lainnya yaitu warung/toko kelontong, restoran, serta warung/kedai makanan minuman. Pertokoan terdapat di empat kecamatan kecuali Kecamatan Kotawaringin Lama, dan Arut Utara.

Toko atau warung kelontong tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Cukup banyak desa yang memiliki toko/warung kelontong. Keberadaan toko kelontong ini sangat membantu penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah yang relatif sulit dijangkau. Kebutuhan penunjang kegiatan perekonomian lainnya ialah koperasi, meskipun tidak semua desa di kawasan perdesaan Kecamatan Kumai memiliki koperasi. Desa yang memiliki koperasi ialah Desa Keraya, Teluk Bogam, dan Kubu masing-masing 1 koperasi, Desa Sabuai dan Sungai Bakau masing-masing tidak memiliki koperasi. Untuk memenuhi kebutuhan akan makanan tersedia warung/kedai makanan yang berjumlah 21 unit dan paling banyak berada di Desa Kubu sejumlah 11 warung makan.

Tabel 2.18
Jumlah Sarana Perdagangan Tahun 2014 Menurut Desa
di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata

Desa	Kios Sembako	Warung Makan	Koperasi
Sabuai	6	0	0
Keraya	7	5	1
Teluk Bogam	16	3	1
Sungai Bakau	30	2	0
Kubu	23	11	1

Sumber: Kecamatan Kumai dalam Angka Tahun 2016

Kini kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sedang mengusahakan BUMDes. Desa yang memiliki BUMDes ialah Desa Sungai Bakau dengan satu BUMDes dan memiliki 20 pengurus dengan lingkup kegiatan sebagai wahana pengadaan simpan pinjam dengan sistem dana bergulir.

2.5.4 Sarana Produksi

Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Terdapat 134 gapoktan di Kecamatan Kumai, untuk kawasan perdesaan terdapat 33 kelompok petani. Dalam mendukung kegiatan bertani para petani di Kawasan Perdesaan Kobar yang berasal dari Desa Sabuai, Sabuai Timur, Keraya, dan Teluk Bogam didukung dengan sarana produksi pertanian yang ada di kawasan perdesaan.

Sarana produksi pertanian (saprotan) dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu saprotan bahan habis pakai, dan alat pendukung pada berbagai tahapan kegiatan pertanian. Saprotan bahan habis pakai yang dimiliki kawasan perdesaan antara lain benih Padi Ciherang yang merupakan bantuan dari dinas pertanian dan peternakan. Saprotan bahan habis pakai seperti zat pengatur tumbuh (ZPT) dan pestisida tidak terdapat di kawasan perdesaan, karena Padi Ciherang ditanam secara organik. Saprotan alat pendukung tahapan kegiatan pertanian yang terdapat di kawasan perdesaan berupa pompa untuk mengambil air bersih, enam unit penggilingan padi, dan empat traktor yang berasal dari dinas pertanian. Pengelolaannya dilakukan di Desa Sabuai yang memiliki lahan pertanian yang luas.

2.5.5 Sarana Sosial Budaya

Lingkungan sosial budaya dipengaruhi oleh aktivitas sosial budaya penduduk, sedangkan dalam melakukan aktivitas sosial dan budaya, penduduk memerlukan sarana dan prasana pendukung kegiatan. Hasil survei lapangan diketahui bahwa desa-desa pada kawasan perdesaan memiliki balai pertemuan dan lapangan olah raga sebagai wahana berkegiatan penduduk. Desa Keraya memiliki balai pertemuan dan tiga lapangan olah raga yang dapat dimanfaatkan untuk sarana berkumpul bagi berbagai kelompok usia penduduk.



Gambar 2.5
Balai Pertemuan dan Lapangan Desa

Sumber: Survei Lapangan, 2016

2.5.6 Sarana Pemerintahan

Setiap desa yang masuk dalam kawasan perdesaan memiliki sarana pemerintahan berupa kantor desa. Masing-masing kantor desa memiliki sarana pendukung di sekitarnya di antaranya ialah balai pertemuan warga. Desa-desanya di kawasan perdesaan memiliki kesamaan antara lain dalam satu lokasi kantor desa terdapat balai pertemuan warga, posyandu, puskesmas pembantu, masjid.



Gambar 2.6
Kantor Desa Kubu dan Sabuai Timur
Sumber: Survei Lapangan, 2016

2.5.7 Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi terdiri dari banyak komponen. Sarana transportasi berupa jalan menjadi penting karena jalan menjadi penghubung antardesa dalam kawasan perdesaan, tanpa jalan, aktivitas masyarakat termasuk kegiatan perekonomian akan terganggu, maka demi kelancaran aktivitas harian masyarakat di kawasan perdesaan keberadaan jalan menjadi sangat penting. Sejauh ini jalan yang berada di kawasan perdesaan terbagi menjadi dua kelompok yakni jalan aspal dan jalan tanah. Desa Kubu, Sungai Bakau, dan Desa Teuk Bogam sudah memiliki jalan aspal, sedangkan Desa Keraya, Desa Sabuai Timur, dan Desa Sabuai masih berupa jalan tanah.



Gambar 2.7
Jalan Aspal Desa Kubu dan Jalan Tanah Desa Sabuai
Sumber: Survei Lapangan, 2016

2.5.8 Sarana dan Prasarana Energi

Sebagai wilayah pesisir dengan mata pencaharian nelayan, kebutuhan penduduk terhadap energi mutlak diperlukan. Terutama solar dan listrik. Solar digunakan para nelayan untuk emnalankan mesin perahu-perahu mereka, dan listrik diperlukan untuk mengoperasikan pabrik es. Hingga tahun 2016 ini, energi bahan bakar solar telah tersedia

di kawasan perdesaan ditandai dengan keberadaan *SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan)*. Namun untuk listrik masih tersedia sebatas untuk keperluan rumah tangga, pembangkit listrik di masing-masing desa terdapat satu, kecuali Desa Kubu memiliki tiga, Sungai Bakau memiliki sebelas, dan Sabuai memiliki dua pembangkit listrik.



Gambar 2.8
Sarana pembangkit listrik Tenaga Listrik Desa Sungai Bakau, dan Sabuai
Sumber: Survei Lapangan, 2016

2.5.9 Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi

Era pembangunan yang serba cepat mutlak memerlukan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi yang memadai. Kawasan perdesaan di Kotawaringin Barat memiliki sarana telekomunikasi berupa telepon rumah, telepon selular, dan radio. Telepon rumah terdapat satu di masing-masing desa, sedangkan pelanggan telepon selular sudah dimiliki masing-masing rumah tangga, dokumen profil Desa Sungai Bakau menunjukkan bahwa Sungai Bakau memiliki pengguna telepon selular lebih dari 2100 pelanggan.

2.5.10 Sarana dan Prasarana Air Bersih

Wilayah pesisir memiliki ciri khas lahan yang didominasi oleh lahan berpasir, hal tersebut menyebabkan wilayah pesisir kesulitan dalam penyediaan air bersih, ditambah dengan air yang payau. Sumur pompa tentu mendominasi dibandingkan dengan sumur gali, hal tersebut dibuktikan dengan data profil desa di Desa Sabuai Timur dan Desa Sungai Bakau yang menunjukkan bahwa jumlah sumur pompa lebih banyak dibandingkan sumur gali. Di Desa Sabuai Timur terdapat 28 sumur pompa, dan 23 sumur gali, sedangkan di Desa Sungai bakau terdapat 221 sumur pompa dengan 4 sumur gal, dan masing-masing memiliki satu bangunan pengolahan air bersih.

2.5.11 Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sistem Manajemen Air

Dikenal dengan kawasan perkebunan, dan pertanian, keberadaan sarana dan prasarana irigasi menjadi penting dikaji di kawasan perdesaan di Kotawaringin Barat. Kawasan perkebunan memanfaatkan aliran sungai dan sumur pompa untuk irigasi perkebunannya, sedangkan untuk kawasan pertanian irigasi dilakukan dengan memanfaatkan air tanah, dan irigasi yang berasal dari Desa Sabuai Timur. Desa Sabuai Timur memiliki satu saluran primer untuk digunakan bersama dengan Desa Sabuai. Saluran sekunder yang dimiliki oleh Desa Sabuai Timur ialah 16 unit, selain Desa Sabuai Timur, Desa Sungai Bakau yang penggunaan lahannya didominasi oleh perkebunan sawit memiliki 5.250 m saluran primer, dan 6.300 m saluran sekunder.

2.5.12 Sarana dan Prasarana Sanitasi

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Batasan pengertian sanitasi menurut WHO adalah pengawasan penyediaan air minum masyarakat, pembuangan tinja dan air limbah, pembuangan sampah, vektor penyakit, kondisi perumahan, penyediaan dan penanganan makanan, kondisi atmosfer dan keselamatan lingkungan kerja. Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga di kawasan perdesaan Kotawaringin Barat sudah memiliki jamban sendiri, demikian juga dengan tempat mencuci baju, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan jasmani cukup besar. Sedangkan untuk tempat pembuangan sampah sarana dan prasarana sudah tersedia namun belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat sekitar karena kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah.



Gambar 2.9
Tempat Sampah di Desa Sabuai Timur
Sumber: Survei Lapangan, 2016

BAB 3

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Potensi Dan Permasalahan

Potensi adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh kawasan perdesaan yang memiliki nilai guna untuk dapat dimanfaatkan atau dibudidayakan sehingga dapat memberikan kebermanfaatn ekonomi sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Potensi dinilai dari aspek fisik dasar, sosial budaya, ekonomi, serta sarana dan prasarana. Masalah adalah segala tantangan yang dimiliki oleh kawasan perdesaan yang dapat menjadi kendala dalam kegiatan pemanfaatan atau budidaya sumber daya kawasan yang ada sehingga menghambat penambahan nilai guna sumberdaya. Berikut adalah potensi dan masalah masing-masing aspek yang dimiliki oleh kawasan agro-mina-wisata yang berlokasi di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat:

Tabel 3.1
Potensi dan Masalah Kawasan Agro-Mina-Wisata Berdasarkan Aspek Fisik Dasar, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Sarana Prasarana

Aspek	Potensi	Masalah
Fisik Dasar	<ul style="list-style-type: none">• Di dominasi oleh lahan datar, dengan kemiringan 0-4%• Memiliki kontur pantai yang landai, kedalaman laut yang tidak teratur dan relatif dangkal dengan dasar perairan berupa pasir berlumpur	<ul style="list-style-type: none">• Didominasi oleh lahan gambut, namun pada kawasan permukiman di dominasi oleh tanah berpasir sebagai ciri kawasan pesisir• Merupakan desa pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut, bersifat dinamis, dan rentan terhadap perubahan lingkungan (secara alami maupun pengaruh manusia) seperti abrasi
Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none">• Warga kawasan perdesaan berasal dari suku Bugis di Sulawesi yang dikenal luas memiliki keahlian dalam melaut• Pendidikan anak-anak nelayan cukup baik, dibuktikan oleh tingkat pendidikan hingga jenjang perkuliahan• Lapangan membuka lahan tanpa membakar lahan	<ul style="list-style-type: none">• Warga dengan mata pencaharian sebagai nelayan memiliki kebiasaan menangkap ikan tanpa mempertimbangkan waktu untuk ikan berkembang biak• Warga dengan mata pencaharian sebagai nelayan terbiasa menangkap ikan dengan menyelam menggunakan kompresor yang berbahaya bagi kesehatan• Petani terbiasa berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok didasarkan atas hubungan kekerabatan atau kedekatan hamparan lahan pertanian yang digarap, sehingga kelompok-kelompok petani jarang yang memiliki kelompok yang aktif dan belum melaksanakan kegiatan simpan pinjam• SDA petani tentang pengelolaan lahan pertanian masih kurang, jika tidak ada peningkatan, maka lahan pertanian semakin terbelakang
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Desa-Desa memiliki dominasi penduduk dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan, dan mata pencaharian sampingan sebagai petani, dengan bercocok tanam di Desa Sabuai	<ul style="list-style-type: none">• Nelayan menggunakan jaring harimau, dan rumpung dan menyebabkan ikan-ikan yang masih kecil ikut terjaring, berpotensi untuk merusak kelestarian ikan• Masyarakat desa memerlukan pelabuhan karena pada musim angin barat air sangat

Aspek	Potensi	Masalah
	<p>dan Sabuai Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan perkebunan memiliki luas >4000 Ha • Tumbuhan daun ujung atap dimanfaatkan daunnya, dan menghasilkan hingga 50 Ton per musim • Hasil panen padi Desa Sabuai sangat berlimpah, hingga banyak padi siap panen yang tidak panen. Karena jumlah padi yang dipanen telah mampu memenuhi kebutuhan harian para petani dan keluarganya. Sedangkan sisanya sebagian dipasarkan • Kawasan pertanisan Tanjung Rema dan Sei Tinggiran masuk kawasan TNTP • Pantai memiliki pemandangan yang indah • Bagian tengah daerah desa Teluk Bogam masuk dalam rencana pembangunan kawasan bandara 	<p>surut mencapai 400 meter ke arah laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan kelapa mengalami kerusakan karena serangan hama • Hanya dijual dalam bentuk daun kering, kepada pengepul • kendala pemasaran karena kurangnya promosi, dan tampilan pengemasan yang belum ada cap, masih berupa kantong plastik polos ukuran 10 Kg dan 20 Kg. bentuknya yang tidak utuh, hal ini diperkirakan karena proses penggilingan yang kurang tepat • Kelompok tani dan nelayan berkelompok sebatas formalitas untuk menanggapi bantuan dari pemerintah daerah
Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Mesin penggilingan padi untuk Desa Sabuai sudah berjumlah 6 unit dan cukup untuk memenuhi kebutuhan panen petani • Terdapat pabrik es • Memiliki balai promosi dan pemasaran • Terdapat stasiun pengisian bahan bakar perahu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan penangkapan ikan masih konvensional kecuali Desa Teluk Bogam, karena mata pencaharian penduduknya di dominasi oleh nelayan • Jalan Usaha tani masih berupa jalan tanah • Jalan utama tiga desa masih berupa jalan tanah, dan pasir • Belum beroperasi karena belum ada listrik yang menjadi energi penggerak pabrik es • Belum beroperasi, karena alasan listrik • Tempat berlabuh perahu / pelabuhan apung belum tersedia

Sumber: Focus Group Discussion, dan Survei Lapangan, 2016

3.2 Klaster Komoditas dan Pendukung

Klaster membagi sasaran-sasaran yang hendak dicapai oleh kawasan perdesaan dalam lima tahun. Pembagian tersebut terdiri atas klaster komoditas dan klaster pendukung. Klaster komoditas di Kawasan perdesaan agro-mina-wisata Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat ditentukan berdasarkan tema kawasan, RTRW, dan aspirasi masyarakat yang menunjukkan peluang pasar untuk mengembangkan komoditas unggulan. Klaster pendukung berupa layanan di tingkat kawasan yang sebagian besar akan dikembangkan di pusat kawasan atau berupa infrastruktur jalan yang menghubungkan antardesa dan antara pusat kawasan dengan desa-desa pendukungnya.

Tabel 3.2
Klaster Komoditas, Klaster Pendukung, dan Sasaran Klaster

No	Klaster	Sasaran Klaster (Dicapai dalam Waktu Lima Tahun)
1	Perikanan	<p>Sekolah lapang perikanan untuk meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi penangkapan, pengolahan hasil, dan pemasaran</p> <p>pabrik es telah beroperasi dan membantu nelayan untuk mengawetkan hasil tangkapan</p> <p>Memiliki dermaga pada masing-masing desa dengan desain yang mencerminkan ciri khas kawasan perdesaan Kotawaringin Barat</p>

No	Klaster	Sasaran Klaster (Dicapai dalam Waktu Lima Tahun)
2	Pertanian: ✓ Padi ✓ Integrasi Sapi-Sawit ✓ Kelapa ✓ Tanaman Ujung atap	Sekolah lapang pertanian rawa untuk meningkatkan kapasitas petani dalam pengolahan tanah, pengolahan hasil panen, dan pemasaran
		petani mampu menghasilkan beras organik kualitas baik dan mengemas beras organik secara menarik
		terdapat kebijakan tentang konsumsi padi lokal dan telah dilaksanakan
		hasil produksi beras ciherang telah dipasarkan di tingkat lokal pangkalan bun-Kumai, hingga ke Jawa
		terdapat dokumen penelitian tentang cara pengembang-biakan tanaman ujung atap, produk turunan tanaman ujung atap
3	<i>Ecotourism</i> : ✓ Pantai Kubu ✓ Tanjung Keluang ✓ Pantai Gosong Beras Basah ✓ Integrasi Sapi-Sawit ✓ Panen Padi dengan perahu	<i>ecotourism</i> telah menjadi OW di Kawasan Perdesaan
		pengembangan sektor wisata <i>ecotourism</i> mengacu pada RIPPARDA dan studi kelayakan tentang analisa pasar dan pengembangan objek wisata
		terdapat atraksi wisata panen padi menggunakan perahu di Desa Sabuai
		terbangun gerbang masuk kawasan perdesaan sebagai zona penerimaan wisata <i>ecotourism</i>
		terdapat kelompok-kelompok sadar wisata di desa-desa kawasan perdesaan
4	Pendukung: ✓ Jalan Usaha Tani ✓ Pabrik Es ✓ Energi listrik ✓ Zona hutan produksi ✓ Perlindungan terhadap abrasi	Penyediaan jalan usaha tani dan pabrik es sebagai sarana produksi pertanian dan perikanan
		Tersedianya layanan pendukung dalam bentuk energi mandiri listrik
		menyelesaikan status lahan hutan produksi melalui pengukuhan lahan yang memberi ruang gerak masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan
		melakukan riset detil dan mendalan terkait abrasi pantai

Sumber: Survei Lapangan, 2016

Klaster komoditas yang menjadi peringkat pertama pada kawasan perdesaan di Kabupaten Kotawaringin Barat ialah perikanan dengan hasil perikanan berupa Rajungan, Kakap dan Bawal. Sektor perikanan menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di kawasan perdesaan Kotawaringin Barat. Hal tersebut dipengaruhi oleh lokasi kawasan perdesaan yang masuk sebagai wilayah pesisir dan suku yang mendominasi ialah Suku Bugis yang dikenal sebagai pelaut yang handal. Kegiatan melaut dilakukan setiap hari karena hasil perikanan yang melimpah, namun kendala pada sektor ini ialah untuk pengawetan ikan masih menggunakan es dari rumah tangga, karena pabrik es yang tersedia di Kawasan Perdesaan belum dioperasikan atas alasan ketersediaan listrik yang terbatas di Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Masalah lain yang dialami nelayan ialah pada angin musim utara air laut mengalami surut, sehingga nelayan membutuhkan jarak yang lebih jauh untuk menambatkan perahunya, biasanya pada musim ini para nelayan menambatkan perahunya pada jarak 400 m dari bibir pantai.

Komoditas kedua yang menjadi unggulan di Kawasan perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat ialah hasil pertanian, terdiri padi, kelapa, kebun kelapa dan integrasi kebun sawit dengan ternak sapi. Padi memiliki ranking satu diantara komoditas pertanian yang lainnya, lokasi lahan pertanian berada di Desa Sabuai dan Sabuai Timur dengan hasil produksi >50 ton dalam setahun. Pertanian di Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam jenis tadah hujan sehingga dipanen satu kali dalam satu tahun. Padi di Sabuai memiliki ciri khas pada sistem panen yang menggunakan perahu sebagai wahan panen. Bibit padi yang ditanam ialah jenis Ciherang. Beras Ciherang merupakan beras organik dengan

keunggulan mudah dibudidayakan, tahan hama, bentuknya putih, butirnya panjang, dan jika dimasak nasinya pulen. Kelebihan beras organik Ciherang tersebut belum mampu menjadi daya tarik dalam pemasaran beras Ciherang di Kumai dan Pangkalan Bun, karena masyarakat Kumai atau Pangkalan Bun kurang menyukai tekstur beras yang pulen dan lebih menyukai jenis beras Banjar dengan tekstur keras dan terurai, faktor lain yang menurunkan daya tarik dalam pemasaran beras Ciherang produksi Sabuai ialah bulirnya patah-patah sebagai akibat penanganan pascapanen yang kurang tepat.

Komoditas pertanian selanjutnya ialah perkebunan sawit yang diintegrasikan dengan peternakan sapi di Desa Kubu. Integrasi sapi dengan sawit ini memberikan dampak yang besar bagi kesuburan tanah, sehingga lahan di lokasi integrasi sapi-sawit dapat dimanfaatkan untuk pertanian tanaman hortikultura. Produk yang dihasilkan dari perkebunan yang mengintegrasikan sapi-sawit ialah pupuk cair, pupuk padat, dan tanaman hortikultura seperti cabai dan buah golden melon yang tergabung dalam P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya) Karya Baru Mandiri. P4S semacam ini sangat menarik perhatian bagi wisatawan maupun pengunjung yang datang dengan tujuan untuk melakukan pelatihan secara berkelompok, menurut peluang ini sehingga P4S sangat potensial untuk dikembangkan sebagai objek tujuan wisata di desa lain seperti Sungai Bakau dan Teluk Bogam yang memiliki peternakan sapi dan kebun sawit yang cukup luas.



Gambar 3.1
Hasil Integrasi Sapi-Sawit Berupa Pupuk dan Tanaman Holtikultura
Sumber: Survei Lapangan, 2016

Sebagai wilayah pesisir keberadaan kelapa menjadi lumrah di Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun, terdapat pula pohon kelapa yang secara sengaja ditanam oleh warga, hasil dari pohon kelapa yang dimanfaatkan sebagai barang ekonomi ialah kelapa yang dijual sebagai buah kelapa muda ke Pangkalan Bun dan Kumai. Namun saat ini perkebunan kelapa muda mengalami masalah kerusakan karena serangan hama, sehingga hasil panennya menurun. Padahal hasil dari perkebunan kelapa dapat digunakan sebagai sumber penghasilan harian oleh warga kawasan perdesaan.

Wilayah pesisir didominasi oleh tanah berpasir yang menjadi media tumbuh bagi tanaman seperti ujung atap dengan nama binomial *Baeckea frutescens* yang masuk dalam famili *Myrtales* atau tumbuhan berbunga. Tanaman ujung atap dapat tumbuh hingga enam meter dan dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan baik bunganya, batangnya, maupun daunnya. Sejauh ini bagian tanaman ujung atap yang menjadi nilai ekonomi di kawasan perdesaan ialah daunnya. Daun tanaman ujung atap memiliki khasiat sebagai bahan *diuretik* atau peluruh kencing, tidak hanya itu daun tanaman ujung atap yang telah dikeringkan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat, hal ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penghasilan sampingan dengan menjual daun dari tanaman ujung atap ke pengepul untuk selanjutnya disalurkan kepada perusahaan obat.



Gambar 3.2
Pohon Ujung Atap di Desa Keraya
Sumber : Survei Lapangan, 2016

Sektor potensial yang terdapat di kawasan perdesaan ialah sektor wisata dengan arah pengembangan *Ecotourism*. Kawasan perdesaan memiliki objek wisata Pantai Kubu, Tanjung Keluang, Pantai Gosong Beras Basah, dan Integrasi Sapi-Sawit. Daya tarik objek wisata di kawasan perdesaan ialah pemandangan yang indah, mudah dijangkau dari Kubu maupun Kumai, suasana tenang, pantai landai dan berpasir putih. Masalah yang dihadapi oleh sektor pariwisata adalah pemasaran yang kurang baik sehingga objek wisata ini kurang menarik minat wisatawan. Selain itu, terdapat wisata yang muncul secara alami yakni wisata memancing dengan nelayan asli di kawasan perdesaan, kegiatan ini menjadi potensi wisata yang menarik dan dapat dikembangkan dengan mengikutsertakan atau menjalin kemitraan bersama masyarakat. Sehingga diperlukan pendampingan masyarakat atau pembentukan kelompok sadar wisata yang mampu menjaga sekaligus mengembangkan objek-objek wisata. Terutama menambah atraksi sehingga mampu meningkatkan daya jual objek wisata, seperti memanfaatkan potensi panen Padi Ciherang di Sabuai dengan perahu.

Klaster komoditas dapat dikembangkan secara maksimal jika terdapat klaster pendukung. Salah satunya ialah jalan usaha tani, jalan usaha tani di kawasan perdesaan masih berupa jalan tanah sehingga penduduk di kawasan perdesaan berharap ada program pengerasan jalan usaha tani. Sarana pendukung berikutnya ialah pabrik es yang terdapat di Desa Teluk Bogam, namun pabrik es ini belum dapat beroperasi karena keterbatasan listrik di kawasan perdesaan. Pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan masyarakat di kawasan perdesaan mengalami kendala karena terdapat peraturan zona hutan produksi. Zona hutan produksi sangat menghambat kegiatan berkebun warga sehingga perlu diselesaikan. Permukiman warga kawasan perdesaan sangat dekat dengan bibir pantai sebagai ciri masyarakat pesisir, namun saat ini permukiman penduduk terancam oleh bencana abrasi yang terus mengancam keberadaan permukiman. Kurang lebih sudah lima tahun kondisi demikian ini berlangsung, sehingga diperlukan perlindungan terhadap abrasi.



Gambar 3.3
Penanganan Abrasi di Desa Kubu dan Desa Sabuai Timur
Sumber: Survei Lapangan, 2016

3.3 Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen perencanaan yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah, antarperangkat daerah, serta perangkat desa yang dikumpulkan sebagai bahan kajian kemudian digunakan untuk telaah atau peninjauan. Dalam peninjauan menghasilkan poin-poin perencanaan yang memiliki keterkaitan dengan tema di kawasan perdesaan, hal ini menyesuaikan dengan tujuan perencanaan kawasan perdesaan yang bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dokumen perencanaan yang digunakan untuk penelaahan di Kabupaten Kotawaringin Barat ialah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2012-2021, rencana pembangunan RPKD (2014), RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2006 - 2025), rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) Desa Keraya (2016-2021), rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) Desa Teluk Bogam (2015 - 2019), rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Desa Sungai Bakau (2014-2018), rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Desa Kubu, Rencana Strategis Distarnak (2012 - 2016), Rencana Kerja Distarnak (2017) , RIPPARDA DINPAR, rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum. Telaah ini merupakan suatu proses peninjauan atas dokumen perencanaan lain yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Berikut hasil telaah dari dokumen-dokumen tersebut:

Tabel 3.3
Penelaahan Dokumen Perencanaan

No	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait/ Program/ Kegiatan Terkait Tema Kawasan Perdesaan	Keterangan
1.	RPJMD Kotawaringin Barat	2012-2021	<p>Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian Kecamatan Kumai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.740 hektar untuk pengembangan dan intensifikasi pertanian pangan 3.175 hektar untuk pengembangan dan intensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan Intensifikasi hortikultura di Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Lama, Kumai, Arut Utara, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada 	<i>Page 47</i>
			<p>Rencana zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> sungai Kumai pada bagian hulu diluar pelayaran sungai arut dan anak sungai dari kelurahan baru sampai desa nanga mua sungai kotawaringin dari desa pendulangan sampai ke kelurahan kotawaringin hilir danau meliputi :danau batang pagar,danau kenambui, danau sulung, danau rangda, danau kedipi, danau asam, danau terusan 	
			<p>Rencana zonasi kawasan peruntukan perikanan budidaya di laut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> budidaya keramba jaring apung pada kawasan Desa Kubu, sei penyimping kearah tanjung keluang budidaya teripang dan rumput laut berada di Desa Sungai Bakau dan Teluk Bogam budidaya air payau ditambak meliputi kawasan sungai ratik desa Sungai Bakau, kawasan teluk ranggau dan sungai gumpung di Desa Sungai Cabang Timur dan kawasan Desa Tanjung Puteri budidaya air payau di sungai meliputi kawasan dari tanjung kalap sampai Desa Sebukat 	

No	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait/ Program/ Kegiatan Terkait Tema Kawasan Perdesaan	Keterangan
			<p>Kawasan pengolahan ikan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan pengolahan ikan meliputi Desa Kapitan, Desa Kubu, Desa Tanjung Putri dan kelurahan mendawai seberang 2. kawasan pelabuhan perikanan meliputi kelurahan Kumai hilir, Desa Kubu, dan pendulangan di Desa Tanjung Putri 3. kawasan pembenihan ikan atau udang meliputi balai benih ikan didesa pasir panjang, UPR pangkalan banteng dan UPR sagu, balai benih udang galah di Desa Kapitan, dan balai benih ikan payau atau udang di Desa Sungai Bakau 4. 4) sarana dan prasarana perikanan tangkap yaitu pusat pelelangan ikan (PPI) Kumai. 	
2.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	2014	<p>Aspek Daya Saing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan infrastruktur transportasi dan energi yang mendukung percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah/interisolasi, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan seperti jalan darat, pelabuhan laut, pelabuhan ro-ro, dan bandara bertaraf internasional 2. Menghilangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat dan lain-lan dan menggantikannya ke dalam skema penyaluran kredit UKM bersyarat ringan melalui pengembangan lembaga penjaminan atau melalui perbankan <p>Program Pembangunan Infrastruktur dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan jalan darat untuk membuka keterisolasian 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan 3. Melanjutkan pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan roro, dan serta pelabuhan samudera guna mendukung percepatan perekonomian daerah 4. Pembangunan Bandara Internasional secara bertahap mengantisipasi kemajuan perekonomian daerah 5. Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan 6. Peningkatan dan Perluasan Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa 7. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. <p>Program Ketahanan Pangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 	

No	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait/ Program/ Kegiatan Terkait Tema Kawasan Perdesaan	Keterangan
			Program Pengembangan Agribisnis berbasis Agropolitan 1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 6. Program Pengembangan budidaya perikanan 7. Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 8. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 9. Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 10. Program Pengembangan perikanan tangkap 11. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 12. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 14. Program Penataan Struktur Industri 15. Program Pengembangan sentrasentra industri potensial	
3.	RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	2006 - 2025	pemenuhan akan kebutuhan dan ketahanan pangan. peningkatan kemampuan menghasilkan, mengolah dan memasarkan berbagai jenis produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang mampu berdaya saing nasional dan internasional keseimbangan ekosistem sehingga mampu menjaga kelestarian alam sebagai sumber dari segala sumber daya kehidupan manusia yang berkelanjutan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam mendukung ekonomi dengan memperhatikan dan tetap menjaga kelestariannya peningkatan kualitas fasilitas dan sarana fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembukaan usaha baru, penyerapan tenaga kerja khususnya UKM dan Koperasi yang berbasis potensi dan Keunggulan Daerah usaha sentra, Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Sentra Produksi - Koperasi (KSP/USP - Kop). kinerja pelayanan perizinan dan pengawasan perizinan serta fasilitasi pengembangan UKM Meningkatnya fungsi Pelabuhan Kumai, bandara Iskandar dalam rangka mobilisasi ekonomi, arus barang, jasa dan orang kelancaran arus lalu lintas barang, jasa dan orang pada semua jenis moda Meningkatnya kualitas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, dan keterkaitannya antar perkotaan Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan Meningkatkan perlindungan kawasan pantai dan tebing sungai Meningkatnya ketahanan pangan di tiap Kecamatan	Halaman 73

No	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait/ Program/ Kegiatan Terkait Tema Kawasan Perdesaan	Keterangan
			<p>Terwujudnya struktur perekonomian yang dibangun dari sektor agribisnis dan agroindustri yang maju dan kompetitif</p> <p>Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan berbasis pada pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan kompetitif</p> <p>Meningkatnya jumlah produksi, mutu, nilai tambah dan pemasaran produk hasil perikanan</p> <p>Meningkatnya kekayaan populasi dan stock ikan melalui pengembangan reservasi usaha budi daya serta terpeliharanya ekosistem sumber daya hayati</p> <p>Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal</p> <p>Bertambah dan berkembangnya penanaman modal</p> <p>Meningkatnya jumlah pembukaan usaha baru, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah</p> <p>Meningkatnya jumlah pembukaan usaha koperasi pada lapangan usaha yang potensial sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah</p>	
4	RPJM Desa Keraya	2016 - 2021	<p>Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Dermaga tambat 2. Lanjutan abrasi Desa Keraya <p>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan bibit tanaan obat 2. Perluasan kebun ujung atap masyarakat <p>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok usaha ekonomi produktif 2. Pelatihan pengelolaan BUMDES 3. Pelatihan pengolahan limbah rajungan 4. Pelatihan pengolahan hasil perikanan 	
5	RPJM Desa Teluk Bogam	2015 - 2019	<p>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan wisata kuliner laut <p>Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	
6	RPJM Desa Sungai Bakau	2014 - 2018	<p>Pekerjaan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Jalan Pertanian di RT 09/ RW 02 2. Perbaikan aspal jalan pertanian RT.05 3. Pengerasan dan pengaspalan Jalan pertanian <p>Sektor pertanian dalam arti luas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perkebunan ujung atap, sengon, karet, mahoni, jabon, jati, dan kelapa sawit (masing-masing 50 Ha) 2. Pengadaan kebun bibit rakyat 3. Pelatiba gapoktan dan kelompok tani 4. Peremajaan tanaman kebun kelapa milik desa dan masyarakat 5. Pembibitan dan penanaman tanaman hutan / mangrove dll 6. Rehabilitasi hutan mangrove <p>Sektor perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi tambak masyarakat 2. Pelatihan dan pengolahan kerang dan lokan 3. Pembuatan pasar ikan 	

No	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait/ Program/ Kegiatan Terkait Tema Kawasan Perdesaan	Keterangan
			Sektor pariwisata: 1. Pelatihan kerajinan ekonomi kreatif untuk masyarakat 2. Pengadaan perahu wisata serta perlengkapannya wisata pancing	
			Sumber daya manusia : 1. Pelatihan kerajinan tangan pembuatan souvenir bagi remaja desa 2. Pembangunan sarana dan prasarna pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	
			Budaya: 1. Bantuan alat kesenian Hadrah, tirik, dan Habsyi	
7	RPJMD Desa Kubu		Pertanian : 1. Pembukaan jalan lahan pertanian 2. Pembangunan irigasi dan Pembukaan jalan Pertanian Sei.Tinggiran 3. Pelatihan pertanian 4. Pelatihan Keterampilan Anyaman dari Purun	
8	Rencana Strategis Distarnak	2012 - 2016	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini dititikberatkan pada aspek peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan kelembagaan petani untuk meningkatkan taraf hidupnya, melalui pelaksanaan kegiatan : 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	
			2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program ini merupakan upaya untuk mendukung ketersediaan dan keamanan pangan baik nabati maupun hewani sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan kegiatan : 1. Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija	
9	Rencana Kerja Distanak	2017	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija	
10	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Kotawaringin Barat		1. Meningkatkan pemasaran dengan fokus pada pangsa terpilih	
			2. Meningkatkan kelengkapan dan kemasan pada daya tarik dan destinasi wisata yang berorientasi pada pangsa dengan kontribusi tertinggi	
			3. Meningkatkan sistem pertandaan dan penunjuk arah daya tarik wisata dan destinasi wisata	
			4. Meningkatkan mutu pemandu wisata untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa asing 5. (Inggris dan Mandarin)	
			6. Menjalin dan meningkatkan kerja sama dalam bidang pariwisata dengan pemerintah daerah dalam kawasan strategis sekitarnya.	
			7. Meningkatkan kerja sama dengan biro-biro perjalanan wisata dalam menciptakan paket wisata terpadu	

No	Dokumen Perencanaan	Periode Waktu	Kebijakan Terkait/ Program/ Kegiatan Terkait Tema Kawasan Perdesaan	Keterangan
			8. Meningkatkan pemahaman terhadap pelestarian dan aktualisasi budaya Kotawaringin Barat bagi masyarakat	
			9. Melaksanakan program pengembangan nilai budaya	
			10. Melaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya	
			11. Melaksanakan program pengelolaan keragaman budaya	
			12. Melibatkan Kelompok Seniman dalam perancangan dan penataan peristiwa budaya dan/atau melibatkan lembaga tersebut dalam pelaksanaannya	
			13. Menyisipkan kepariwisataan dalam proses belajar-mengajar (termasuk ekstra-kurikuler)	
			14. Menyediakan website bagi setiap daya tarik dan destinasi wisata	
			15. Menyediakan peta wisata, lengkap dengan rute transportasi umum dan arah-arah	
			16. Melakukan pemberdayaan dan pendampingan pelaku usaha kuliner	
			17. Meningkatkan peran badan/lembaga kepariwisataan yang telah ada, serta pengaktifasian lembaga tersebut	
			18. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab	
			19. Melakukan pendampingan pada kelompok seni tradisional untuk melestarikan budaya	
			20. Menyusun paket wisata terpadu antar destinasi wisata Kabupaten Kotawaringin Barat dengan destinasi wisata sekitar	
11	Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum		Program Pembangunan jalan dan jembatan	
			Kegiatan pembangunan turap/ talud/ bronjong dan Pengelolaan Jaringan Terlaksananya Irigasi,Rawa dan Jaringan pengembangan dan Pengairan Lainnya	
			pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	
			Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	
			Pembangunan pintu air	
			Program perencanaan tata ruang	

Sumber:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-20216, Rencana Pembangunan RPKD (2014), RPJP Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (2006 - 2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Keraya (2016-2021), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Teluk Bogam (2015 - 2019), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sungai Bakau (2014-2018), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kubu, Rencana Strategis Distarnak (2012 - 2016), Rencana Kerja Distarnak (2017) , RIPPARDA DINPAR, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum

3.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan Kawasan Perdesaan karena dampaknya yang signifikan bagi kawasan/masyarakat di masa yang akan datang, yang ditentukan berdasarkan kriteria:

- Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kawasan Perdesaan dan relevan terhadap pencapaian target pembangunan daerah;
- Kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Isu strategis di kawasan perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat didapatkan dari inventarisasi isu. Inventarisasi isu dijaring dalam *forum Focussed Group Discussion* (FGD)

dan survei lapangan di Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut isu strategis di kawasan perdesaan agro-mina-wisata Kabupaten Kotawaringin Barat:

a) Integrasi sawit-sapi: pertanian-perkebunan-pariwisata

Lahan dengan tanah gambut merupakan jenis tanah yang mendominasi kawasan perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Lahan gambut dikenal sulit digunakan untuk bercocok tanam terutama jenis tanaman hortikultura, namun mudah untuk mengolah tanaman seperti sawit, daun dan bungkil dari tanaman sawit sangat disukai oleh sapi yang merupakan hewan ternak yang mendominasi kawasan perdesaan di Kotawaringin Barat. Keterbatasan lahan dan peluang komoditas sapi dan sawit tersebut kemudian dimanfaatkan oleh petani lokal untuk mengintegrasikan sapi dan sawit. Daun dan bungkil tanaman sawit dijadikan sebagai sumber pakan bagi ternak sapi, sedangkan hasil kotoran dari ternak sapi digunakan untuk pupuk tanaman sawit. Kemudian hasil dari pengolahannya digunakan untuk menyuburkan tanah, sehingga lahan gambut menjadi mampu untuk ditanami tanaman hortikultura. Dan juga sebagian lahannya digunakan untuk beternak bebek, dan kolam ikan.

Hasil integrasi sapi dan sawit di Desa Kubu kini berkembang menjadi tempat pelatihan pertanian yang dapat dikunjungi berbagai kalangan yang hendak berkunjung untuk berlatih maupun yang berwisata, seperti pegawai SKPD, siswa sekolah, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang tertarik dengan pertanian perdesaan.

b) *Ecotourism* yang terintegrasi dengan kehidupan nelayan

Potensi wisata di kawasan perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh kondisi alam, salah satunya pantai yang landai dan arus yang tenang. Kelebihan ini kemudian dimanfaatkan para penikmat wisata khusus memancing sebagai *spot* wisata mereka. Kegiatan memancing bersama dengan perahu milik nelayan kemudian berkembang secara alami di kawasan perdesaan Kotawaringin Barat, jika mampu mengemas wisata minat khusus ini, maka atraksi yang ditawarkan oleh wisata di kawasan perdesaan akan beragam.

c) Potensi Daun Ujung Atap

Tanah berpasir yang menjadi media tumbuh pagi tanaman pesisir banyak dijumpai di Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat. Tanah berpasir tersebut mendukung pertumbuhan tanaman seperti ujung atap. Tanaman Ujung Atap merupakan tanaman obat dengan nama binomial *Baeckea frutescens* yang masuk dalam famili *Myrtales* atau tumbuhan berbunga. Tanaman ujung atap dapat tumbuh hingga enam meter dan dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan baik bunganya, batangnya, maupun daunnya. Sejauh ini bagian tanaman ujung atap yang menjadi nilai ekonomi di kawasan perdesaan ialah daunnya. Daun tanaman ujung atap memiliki khasiat sebagai bahan *diuretik* atau peluruh kencing, tidak hanya itu daun tanaman ujung atap yang telah dikeringkan dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat, hal ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penghasilan sampingan dengan menjual daun dari tanaman ujung atap ke pengepul (di Kecamatan Kumai) untuk selanjutnya disalurkan kepada perusahaan obat.

d) Pengolahan pascapanen padi lokal dan pemasaran beras organik

Padi berada di peringkat satu di antara komoditas pertanian yang lainnya, lokasi lahan pertanian berada di Desa Sabuai dan Sabuai Timur dengan hasil produksi >50 ton dalam setahun. Pertanian di Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam jenis tadah hujan sehingga dipanen satu kali dalam satu tahun. Padi di Sabuai memiliki ciri khas

pada sistem panen yang menggunakan perahu sebagai wahana panen. Bibit padi yang ditanam ialah jenis Ciherang. Beras Ciherang merupakan beras organik dengan keunggulan mudah dibudidayakan, tahan hama, bentuknya putih, butirnya panjang, dan jika dimasak nasinya pulen. Kelebihan beras organik Ciherang ini tidak mampu menjadi daya tarik dalam pemasaran beras Ciherang di Kumai dan Pangkalan Bun, karena masyarakat Kumai atau Pangkalan Bun kurang menyukai tekstur beras yang pulen dan lebih menyukai jenis Beras Banjar dengan tekstur keras dan terurai, beras Ciherang produksi Desa Sabuai bulirnya patah-patah sebagai akibat penanganan pascapanen yang kurang tepat.

e) Rencana Pembangunan Pelabuhan dan Bandara

Saat ini Kabupaten Kotawaringin Barat sedang giat membangun daerah. Berbagai perencanaan pengembangan daerah dan zonasi ruang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2014 silam, Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan perencanaan struktur ruang, dengan arah pengembangan daerah kota baru. Dalam perencanaan kota baru tersebut daerah kotawaringin Barat dibagi atas zona-zona pengembangan yang di dalamnya terbangun fasilitas, infrastruktur, serta sarana dan prasarana. Salah satunya ialah fasilitas bandara dan pelabuhan yang lokasinya direncanakan berada di Kawasan Perdesaan khususnya di Desa Teluk Bogam dan Sungai Bakau untuk Bandara, dan di Desa Keraya untuk pembangunan pelabuhan.

Perencanaan ini telah dimulai dengan tahap zonasi lahan, dan pembukaan jalan menuju bandara. Keberadaan perencanaan bandara tentu menjadi isu strategis dalam rangka pembentukan kawasan perdesaan, pasalnya arah kebijakan pembentukan kawasan perdesaan harus selaras dengan tujuan daerah dalam mengembangkan kota baru. Dalam hal ini peran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi penting. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, masyarakat perlu disiapkan kemampuannya agar siap menerima perubahan di daerahnya, serta menyiapkan ketrampilan agar mampu bersaing dengan pendatang yang berpotensi mengambil peran atas kegiatan ekonomi di kota baru. Sebagai subjek, masyarakat di kawasan perdesaan perlu berkontribusi, dan berperan aktif memberikan masukan arah kebijakan pembangunan, sebab penduduk lokal memiliki kearifan yang sangat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan dijadikan identitas, agar tidak hilang oleh arus modernisasi.

f) Ancaman kerusakan lingkungan akibat abrasi dan konservasi mangrove menjadi tambak dan kebun sawit

Kawasan perdesaan di kotawaringin Barat di dominasi oleh lahan datar, dengan kemiringan 0-4%, dan memiliki kontur pantai yang landai, kedalaman laut yang tidak teratur dan relatif dangkal dengan dasar perairan berupa pasir berlumpur. Jenis tanah di kawasan perdesaan sangat kompleks, terdapat lahan gambut di sebagian besar desa, namun pada kawasan permukiman di dominasi oleh tanah berpasir sebagai ciri kawasan pesisir.

Kawasan perdesaan dengan tema agro-mina-wisata ini merupakan desa pesisir yang dipengaruhi pasang surut air laut, bersifat dinamis, dan rentan terhadap perubahan lingkungan (secara alami maupun pengaruh manusia) seperti abrasi/erosi laut. Saat ini permukiman penduduk terancam oleh bencana abrasi yang terus mengancam keberadaan permukiman, karena permukiman warga kawasan perdesaan sangat dekat dengan bibir pantai sebagai ciri masyarakat pesisir. Kurang lebih sudah lima tahun kondisi demikian ini berlangsung, sehingga diperlukan perlindungan terhadap abrasi.

Sejauh ini penanganan terhadap erosi dilakukan dengan pembangunan talud, dan penanaman mangrove, namun hasilnya kurang maksimal. Mangrove yang ditanam tidak tumbuh subur di Desa Keraya, dan justru menciptakan tombolo yang mempersulit keluar masuk perahu nelayan. Sehingga diperlukan penanganan serius untuk abrasi, penanganan harus menyesuaikan dengan karakteristik arus, dan lingkungan kawasan perdesaan.

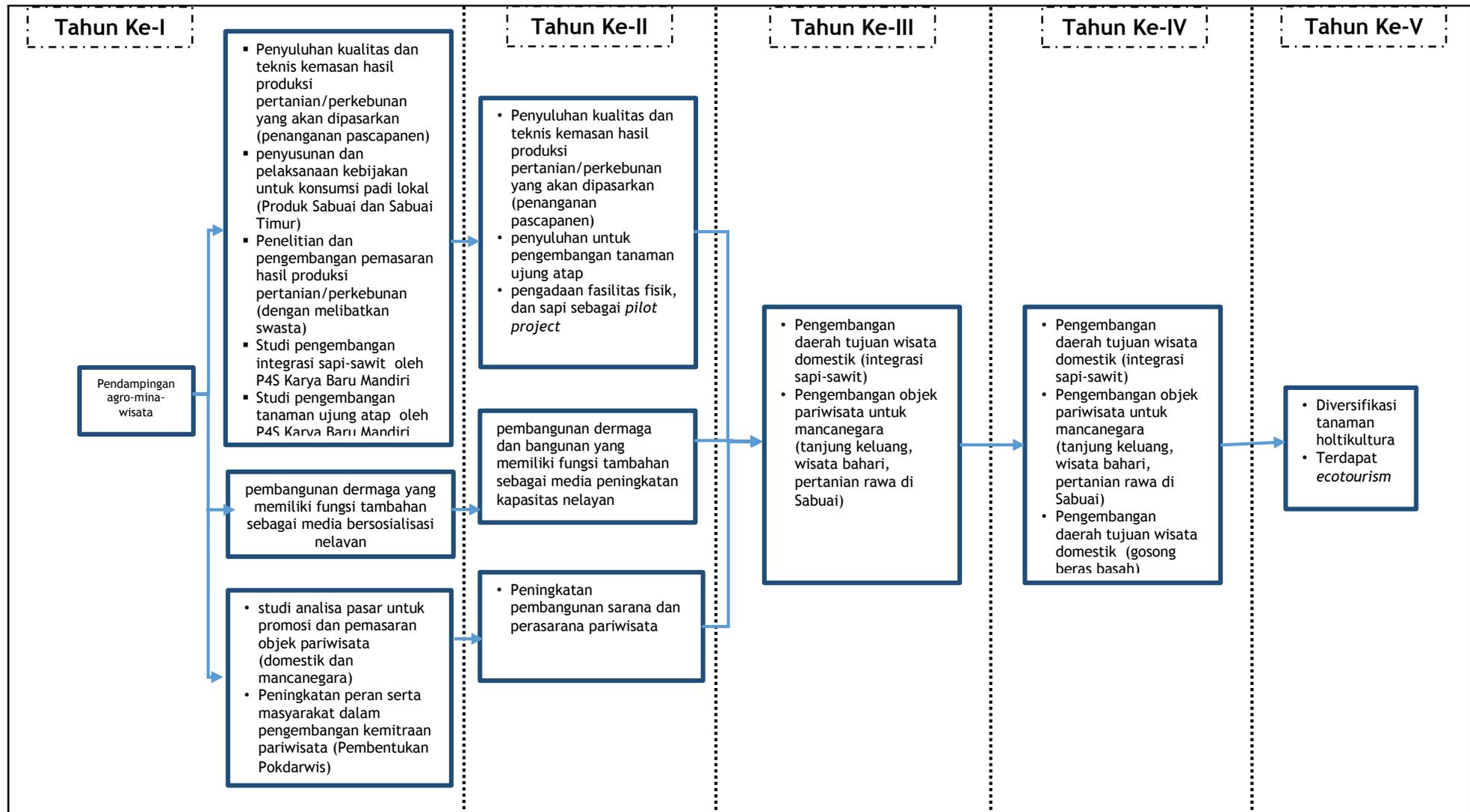
3.5 Analisis Sinergisme

Sinergisme memiliki makna menyatukan energi agar terbentuk kekuatan baru yang pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sinergisme memiliki makna kegiatan yang tergabung, biasanya pengaruhnya lebih besar daripada jumlah total pengaruh masing-masing atau satu per satu. Hal yang dimaksud satu per satu ialah komponen yang menjadi potensi, dalam hal ini ialah potensi yang terdapat di kawasan perdesaan di Kobar.

Kawasan Perdesaan di Kotawaringin Barat memiliki beragam potensi, mulai dari perikanan, pertanian, hingga wisata. Hasil perikanan dan pertanian memiliki peran besar sebagai *supporting* kehidupan penduduk di Kawasan Perdesaan Kobar namun memiliki masalah. Masalah yang dialami oleh sektor perikanan antara lain belum tersedia dermaga untuk menambatkan perahu para nelayan, selain itu nelayan juga belum memiliki tempat untuk melakukan sosialisasi. Masalah yang dialami oleh sektor pertanian ialah penanganan pascapanen hasil padi Ciharang belum baik, untuk tanaman perkebunan seperti tanaman ujung atap masalah berada pada lemahnya kemampuan masyarakat dalam proses pengembangan produktifitas dan pengolahan tanaman tersebut. Di sisi lain, terdapat potensi berupa integrasi sapi-sawit yang menarik untuk dikembangkan dengan tujuan diversifikasi hasil pertanian dan sebagai objek wisata domestik, dengan demikian penting menyediakan kegiatan yang mendorong pengembangan produktifitas, pemasaran dan diversifikasi hasil perikanan dan pertanian. Kegiatan tersebut kemudian disinergikan seperti yang tertera pada gambar 3.5.

Selanjutnya, rumusan kegiatan menghasilkan produk pertanian dan perikanan yang memiliki nilai jual sehingga dapat diarahkan sebagai pendukung untuk pengembangan wisata berbasis lingkungan. Namun, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pengembangan kegiatan wisata berbasis lingkungan. Salah satu bentuknya ialah pembentukan kelompok sadar wisata di masing-masing desa. Kelompok sadar wisata yang dibentuk diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengembangan objek wisata kawasan perdesaan. Hal tersebut mendukung asas bahwa pembangunan akan lebih memiliki manfaat jika dilakukan dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa.

Setelah mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengembangan objek wisata, pemerintah perlu melakukan pemasaran dan promosi objek wisata yang terdapat di kawasan perdesaan, termasuk membangun papan informasi menuju dan dari objek wisata, papan informasi tersebut dapat diletakkan di bandara, pelabuhan, pusat informasi wisata, maupun titik penting lainnya yang memiliki potensi menraik perhatian individu. Tujuan akhir dari sinergisme pembangunan di Kawasan Perdesaan ialah menjadikan objek wisata yang terdapat di kawasan perdesaan sebagai media untuk pemasaran hasil pertanian dan perikanan.



Gambar 3.4
 Analisis Sinergitas Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat
 Sumber: Analisis, 2016

BAB 4

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dirumuskan merupakan merupakan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ingin dicapai melalui perencanaan kawasan perdesaan. Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dari perencanaan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

4.1 Tujuan

Tujuan pada dasarnya merupakan keadaan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan pembangunan kawasan perdesaan agro-mina-wisata Kabupaten Kotawaringin Barat dirumuskan dari visi Kabupaten Kotawaringin Barat, aspirasi masyarakat yang muncul dalam *Focus Group Discussion*, dan kondisi kawasan perdesaan baik potensi maupun masalah yang telah dirinci menjadi isu strategis kawasan perdesaan.

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan pascapanen dan pemasaran beras organik Ciherang

Hasil analisis isu strategis tentang Pengelolaan pascapanen dan pemasaran beras organik Ciherang dari Sabuai dan Sabuai Timur masih rendah, maka dirumuskan tujuan “Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan pascapanen dan pemasaran beras organik Ciherang”. Tujuan tersebut bermaksud untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan pasca panen dan pemasaran beras organik Ciherang yang dihasilkan Desa Sabuai dan Sabuai Timur. Kondisi kawasan perdesaan yang mendasari perumusan isu tersebut ialah SDA petani tentang pengelolaan lahan pertanian masih kurang jika tidak ada peningkatan kemampuan petani, maka lahan pertanian semakin terbelakang, selanjutnya kendala pemasaran karena kurangnya promosi, dan tampilan pengemasan yang belum ada cap dan masih berupa kantong plastik polos ukuran 10 Kg dan 20 Kg, kekurangan lainnya ialah bentuk benih yang tidak utuh, hal ini diperkirakan karena proses penggilingan yang kurang tepat. Hasil komoditas pertanian lainnya ialah daun tanaman ujung atap, daun tanaman hanya dijual dalam bentuk daun kering kepada pengepul. Para petani di Kawasan perdesaan ini terbiasa berinteraksi dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok didasarkan atas hubungan kekerabatan atau kedekatan hamparan lahan pertanian yang digarap, sehingga kelompok-kelompok petani jarang yang memiliki kelompok yang aktif dan belum melaksanakan kegiatan simpan pinjam. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat dalam penanganan pascapanen termasuk pemasaran diperlukan.

2. Memperbanyak keberadaan integrasi sapi-sawit di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kotawaringin Barat

Hasil analisis isu strategis bahwa Integrasi sapi-sawit berpotensi untuk dikembangkan ke desa lain, maka dirumuskan tujuan “Memperbanyak keberadaan integrasi sapi-sawit di

Kawasan Perdesaan Agro-mina-wisata Kotawaringin Barat”. Tujuan tersebut bermaksud untuk menambah guna lahan gambut dan meningkatkan produktifitas lahan, karena dengan kegiatan integrasi sapi-sawit lahan terbukti menjadi lebih produktif dan mampu menghasilkan diversifikasi hasil pertanian. Kondisi kawasan perdesaan yang mendasari perumusan isu tersebut ialah penggunaan lahan kawasan perdesaan untuk perkebunan memiliki luas >4000 Ha, dan saat ini telah terdapat kegiatan integrasi sapi-sawit di Desa Kubu, dan desa yang akan dikembangkan yakni di Desa Sungai Bakau dan Teluk Bogam terdapat peternakan Sapi.

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan perdesaan tentang tanaman ujung atap

Hasil analisis isu strategis menunjukkan bahwa terdapat daun ujung atap yang bermanfaat sebagai tanaman obat, maka dirumuskan tujuan “meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan perdesaan tentang tanaman ujung atap”. Tujuan tersebut bermaksud untuk menambah sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat di kawasan perdesaan tentang tanaman ujung atap, karena tanaman ujung atap memiliki potensi dikembangkan, hal ini dipengaruhi oleh manfaat tanaman ujung atap sebagai bahan dasar obat yang memiliki beragam manfaat salah satunya sebagai bahan deuretik. Kondisi kawasan perdesaan yang mendasari perumusan isu tersebut ialah tumbuhan daun ujung atap dimanfaatkan daunnya sebagai bahan dasar obat oleh PT.Sidomuncul, dan menghasilkan hingga 50 ton daun kering per musim panen.

4. Meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan

Hasil analisis isu strategis menunjukkan bahwa kemampuan nelayan dalam metode penangkapan ikan ramah lingkungan masih kurang, maka dirumuskan tujuan “meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan”. Tujuan tersebut bermaksud untuk menambah sekaligus meningkatkan kemampuan nelayan dalam menangkap ikan yang berorientasi pada lingkungan agar tercipta kegiatan tangkap ikan yang berkelanjutan, karena pemahaman masyarakat masih berdasar pada sumber daya alam berupa ikan masih sangat melimpah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi kawasan perdesaan yang mendasari perumusan isu tersebut ialah warga dengan mata pencaharian sebagai nelayan memiliki kebiasaan menangkap ikan tanpa mempertimbangkan waktu untuk ikan berkembang biak, dan masyarakat desa memerlukan pelabuhan karena pada musim angin barat air sangat surut mencapai 400 meter ke arah laut.

5. Mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi wisata

Hasil analisis isu strategis menunjukkan bahwa di kawasan perdesaan terdapat ancaman kerusakan lingkungan akibat abrasi dan konversi mangrove menjadi tambak dan kebun sawit, maka dirumuskan tujuan “mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi wisata”. Tujuan tersebut bermaksud untuk menangani bencana abrasi di pesisir kawasan perdesaan, karena abrasi dapat mengganggu kawasan permukiman warga dan merusak keindahan pemandangan yang menjadi daya tarik wisata. Kondisi kawasan perdesaan yang mendasari perumusan isu tersebut ialah kawasan perdesaan memiliki kontur pantai yang landai, dengan kedalaman laut yang tidak teratur dan relatif dangkal dengan dasar perairan berupa pasir berlumpur, masalah mendasar yang perlu diperhatikan ialah aspek sumber daya manusia yang menjadi subjek sekaligus objek pembangunan, terutama di kawasan perdesaan belum terdapat kelompok sadar wisata.

6. Membangun kawasan perdesaan agar sejalan dengan rencana pembangunan daerah Kotawaringin Barat

Hasil analisis isu strategis menunjukkan bahwa di kawasan perdesaan terdapat rencana pembangunan pelabuhan dan bandara, maka dirumuskan tujuan “membangun kawasan perdesaan agar sejalan dengan rencana pembangunan daerah Kotawaringin Barat”. Tujuan tersebut bermaksud agar pembangunan di Kotawaringin Barat dapat selaras, tidak tumpang tindih, dan tidak bersinggungan, karena dasar perencanaan kawasan perdesaan ialah menggabungkan konsep desa membangun, dan membangun desa. Kondisi kawasan perdesaan yang mendasari perumusan isu tersebut ialah terdapat dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dan bandara yang rencananya dilaksanakan di kawasan perdesaan.

7. Mewujudkan wisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan dekat dengan kehidupan warga lokal

Hasil analisis isu strategis menunjukkan bahwa di kawasan perdesaan terdapat beragam potensi yang dapat disinergikan menuju *ecotourism* yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat, oleh karena itu, dirumuskan tujuan “mewujudkan wisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan dekat dengan kehidupan warga lokal”. Tujuan tersebut bermaksud agar warga desa di kawasan perdesaan menjadi masyarakat yang berdaya sehingga mampu bersaing dengan para pendatang dan berdaya dalam mengembangkan potensi desa menjadi objek wisata, tanpa mengesampingkan kemampuan alami mereka, di sisi lain hal ini mendukung keikutsertaan masyarakat. Kondisi kawasan perdesaan yang mendasari perumusan isu tersebut ialah terdapat dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan dan bandara yang rencananya dilaksanakan di kawasan perdesaan.

8. Meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan kawasan perdesaan

Kondisi fisik kawasan perdesaan Kotawaringin Barat berupa wilayah pesisir yang memiliki sifat dinamis, akibat aktifitas manusia maupun lingkungan. Sehingga masyarakat kawasan perdesaan perlu memiliki wawasan mengenai karakteristik, potensi dan masalah di lingkungannya. Jika masyarakat telah memiliki wawasan, maka diharapkan masyarakat memiliki kemandirian dalam pengelolaan wilayah pesisir di kawasan perdesaan. hal ini sejalan dengan tujuan yakni menuju *ecotourism* yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan pernyataan-pernyataan target yang harus dicapai untuk mewujudkan suatu tujuan. Berdasarkan tujuh tujuan pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, sasaran yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan pascapanen dan pemasaran beras organik Cihérang”, “Memperbanyak keberadaan integrasi sapi-sawit di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kotawaringin Barat”, dan “Meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan perdesaan tentang tanaman ujung atap” maka akan dapat dicapai dengan sasaran:
 - a. **Terwujudnya kemandirian dalam pemasaran hasil produksi komoditas pertanian/perkebunan**

Sasaran untuk mencapai tujuan Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan pascapanen dan pemasaran beras organik Ciherang”, “Memperbanyak keberadaan integrasi sapi-sawit di Kawasan Perdesaan Agro-mina-wisata Kotawaringin Barat”, dan “Meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan perdesaan tentang tanaman ujung atap” adalah **terwujudnya kemandirian dalam pemasaran hasil produksi komoditas pertanian/perkebunan**. Hal ini perlu diwujudkan agar hasil pertanian dan perkebunan di kawasan perdesaan dapat dipasarkan dengan menyertakan nilai tambah, sehingga mampu membantu meningkatkan kesejahteraan warga kawasan perdesaan.

2. Untuk mencapai tujuan “meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan”, maka akan dapat dicapai dengan sasaran:

- a. **terwujud aktifitas tangkapan ikan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan**

Sasaran untuk mencapai peningkatan kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan adalah terwujud aktivitas tangkapan ikan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Permasalahan di kawasan perdesaan ini pada dasarnya terkait dengan pengetahuan atau wawasan penduduk yang masih rendah, baik terhadap kegiatan penangkapan ikan, bertani, bahkan hal-hal dasar seperti kebersihan lingkungan. Pada kawasan perdesaan ini belum terdapat penyuluhan yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan penduduk sehingga masyarakat lebih berdaya.

3. Untuk mencapai tujuan “mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi wisata”, maka akan dapat dicapai dengan sasaran “kerusakan lingkungan mampu diselesaikan tanpa mengganggu aktifitas wisata”.

Sasaran ini sangat diperlukan mengingat kawasan perdesaan merupakan wilayah pesisir yang memiliki potensi wisata khas wilayah pesisir seperti pantai, dan sumber daya laut. Namun, wilayah pesisir juga memiliki masalah khas wilayah pesisir seperti abrasi, dan sedimentasi, masalah ini dapat memicu kerusakan potensi wisata. Menjaga kelestarian potensi dan menyelesaikan masalah menjadi fokus agar wisata di kawasan perdesaan dapat dikembangkan, tentu saja dalam pengembangannya diperlukan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam lingkungan, agar langkah-langkah penyelesaian masalah tidak mengganggu aktifitas wisata. Sehingga keikutsertaan masyarakat dalam mengurangi dampak kerusakan lingkungan mutlak diperlukan.

4. Untuk mencapai tujuan “membangun kawasan perdesaan agar sejalan dengan rencana pembangunan daerah Kotawaringin Barat”, dan “mewujudkan wisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan dekat dengan kehidupan warga lokal”, maka akan dapat dicapai dengan sasaran “kawasan perdesaan terbangun sebagai pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi lokal”.

Sasaran keempat memiliki peran sebagai penghubung dengan misi Kabupaten Kotawaringin Barat. Sasaran tersebut juga mendukung rencana pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu membangun wilayah perkotaan baru, yang lokasinya berada di Kawasan perdesaan. Untuk mendukung rencana tersebut diperlukan persiapan dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, aspek wilayah, hingga aspek sosial yang melingkupi kemampuan penduduk untuk bersaing.

5. Untuk mencapai tujuan “meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan kawasan perdesaan”, maka akan dapat dicapai dengan sasaran terwujud kemampuan masyarakat dalam melestarikan sumber daya alam wilayah pesisir.

Sasaran ke-lima memiliki peran sebagai wujud pemberdayaan masyarakat sekitar. Di sisi lain juga memberikan kemampuan dalam menjaga kelestarian potensi, sehingga kekayaan lingkungan kawasan perdesaan tidak harus dikelola pihak lain.

4.3 Strategi

Penyusunan strategi merupakan tahapan selanjutnya setelah menganalisis isu-isu strategis serta merumuskan tujuan dan sasaran Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan agro-mina-wisata Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

1. peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
2. Peningkatan hasil produksi perkebunan dan peternakan
3. Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan
4. Peningkatkan kualitas perikanan tangkap
5. Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan
6. Penambahan atraksi pada destinasi wisata kawasan perdesaan yang bersumber dari potensi agro dan mina
7. peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan SDA wilayah pesisir

4.4 Arah Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis isu strategis, rumusan tujuan, sasaran, dan strategi, maka tahap selanjutnya adalah perumusan arah kebijakan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Berikut ini adalah arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan agro-mina-wisata Kabupaten Kotawaringin Barat:

1. Menciptakan pasar hasil produksi pertanian dan perkebunan
2. Memperpendek alur pasar, dan menguatkan manajemen keuangan kelompok
3. Meningkatkan diversifikasi produk pertanian dan perkebunan
4. Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap; Membangun fasilitas vital untuk nelayan
5. Meningkatkan *marketing, sustainability, dan participatory (MSP)*
6. Menambah atraksi pada destinasi wisata kawasan perdesaan

Berdasarkan penjelasan terkait tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat diringkaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengelolaan pascapanen dan pemasaran beras organik Ciherang dari Sabuai dan Sabuai Timur masih rendah	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan pascapanen dan pemasaran beras organik Ciherang yang dihasilkan Desa Sabuai dan Sabuai Timur	Terwujud kemandirian dalam pemasaran hasil produksi komoditas pertanian/ perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Menciptakan pasar hasil produksi pertanian dan perkebunan
Integrasi sapi-sawit berpotensi untuk dikembangkan ke desa lain	Memperbanyak keberadaan integrasi sapi-sawit di Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kotawaringin Barat		Peningkatan hasil produksi perkebunan dan peternakan	Memperpendek alur pasar, dan menguatkan manajemen keuangan kelompok
Terdapat daun ujung atap yang bermanfaat sebagai tanaman obat	Meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan perdesaan tentang tanaman ujung atap		Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Meningkatkan diversifikasi produk pertanian dan perkebunan
Kemampuan nelayan dalam metode penangkapan ikan ramah lingkungan masih kurang	Meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Terwujud aktifitas tangkapan ikan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas perikanan tangkap	Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap; Membangun fasilitas vital untuk nelayan.
Ancaman kerusakan lingkungan akibat abrasi dan konversi mangrove menjadi tambak dan kebun sawit	Mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi wisata	Kerusakan lingkungan mampu diselesaikan tanpa mengganggu aktifitas wisata	Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan	Meningkatkan <i>marketing, sustainability, dan participatory (MSP)</i>
<i>Ecotourism</i> yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat	Mewujudkan wisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan dekat dengan kehidupan warga lokal	Kawasan perdesaan terbangun sebagai pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi lokal	Penambahan atraksi pada destinasi wisata kawasan perdesaan yang bersumber dari potensi agro dan mina	Menambah atraksi pada destinasi wisata kawasan perdesaan
	Meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan kawasan perdesaan		Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan SDA wilayah pesisir	

Sumber: Hasil Analisis, 2016

BAB 5

PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Matriks Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah segala macam upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan agar dapat menanggulangi masalah yang ada sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada di kawasan perdesaan. Perumusan Program Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk lima tahun ke depan merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan. Rencana program Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-mina-wisata Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
2. program pengembangan perikanan tangkap
3. program peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir
4. program pengembangan pemasaran pariwisata
5. program peningkatan daya tarik destinasi desa wisata
6. program pengembangan destinasi pariwisata agro
7. program penyuluhan untuk diversifikasi

Perumusan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) untuk lima tahun ke depan ini merupakan penjabaran yang bersifat lebih mendalam dan operasional dari program yang telah dirumuskan. Rencana kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-mina-wisata Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui tabel yang sudah dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
Pengelolaan pascapanen dan pemasaran beras organik Ciherang dari Sabuai dan Sabuai Timur masih rendah	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanganan pascapanen dan pemasaran beras organik Ciherang yang dihasilkan Desa Sabuai dan Sabuai Timur	terwujud kemandirian dalam pemasaran hasil produksi komoditas pertanian/ perkebunan	peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Menciptakan pasar hasil produksi pertanian dan perkebunan;	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani
				Memperpendek alur pasar, dan menguatkan manajemen keuangan kelompok;		Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan (penanganan pascapanen)
			Peningkatan hasil produksi perkebunan dan peternakan	Meningkatkan diversifikasi produk pertanian dan perkebunan		Penyusunan kebijakan untuk konsumsi padi lokal (Produk Sabuai dan Sabuai Timur)
						Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (dengan melibatkan swasta)
Integrasi sapi-sawit berpotensi untuk dikembangkan ke desa lain	Memperbanyak keberadaan integrasi sapi-sawit di Kawasan Perdesaan Agro-mina-wisata Kotawaringin Barat	Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan	Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap; Membangun fasilitas vital untuk nelayan.		Studi pengembangan integrasi sapi-sawit oleh P4S Karya Baru Mandiri	
					Studi pengembangan tanaman ujung atap oleh P4S Karya Baru Mandiri	
				penyuluhan untuk pengembangan tanaman ujung atap		
Terdapat daun ujung atap yang bermanfaat sebagai tanaman obat	Meningkatkan pengetahuan masyarakat kawasan perdesaan tentang tanaman ujung atap				pengadaan fasilitas fisik, dan sapi sebagai <i>pilot project</i>	
Kemampuan nelayan dalam metode penangkapan ikan ramah lingkungan masih kurang	Meningkatkan kemampuan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Terwujud aktifitas tangkapan ikan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatkan kualitas perikanan tangkap	Meningkatkan kapasitas nelayan tangkap; Membangun fasilitas vital untuk nelayan.	Program pengembangan perikanan tangkap	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas nelayan
						pembangunan dermaga yang memiliki fungsi tambahan sebagai media bersosialisasi nelayan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	
Ancaman kerusakan lingkungan akibat abrasi dan konversi mangrove menjadi tambak dan kebun sawit	Mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan terhadap potensi wisata	kerusakan lingkungan mampu diselesaikan tanpa mengganggu aktifitas wisata	Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan	Meningkatkan marketing, sustainability, dan participatory (MSP)	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat (Bimbingan dan Pelatihan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam Pesisir)	
						Penguatan kapasitas lembaga-lembaga termasuk pokdarwis, kelompok petani, dan kelompok nelayan	
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pembentukan Pokdarwis)	
						Latihan Kepemanduan & Sertifikasi	
Ecotourism yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat	Mewujudkan wisata yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan dekat dengan kehidupan warga lokal	Kawasan perdesaan terbangun sebagai pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi lokal	Penambahan atraksi pada destinasi wisata kawasan perdesaan yang bersumber dari potensi agro dan mina	Menambah atraksi pada destinasi wisata kawasan perdesaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Desa Wisata	Pelaksanaan Event Festival Desa Wisata Pesisir	
						Pembangunan Sistem Informasi Wisata	
	Meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan kawasan perdesaan		Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan SDA wilayah pesisir		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Agro	Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (integrasi sapi-sawit)	
						Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (gosong beras basah)	
						Pengembangan objek pariwisata untuk mancanegara (tanjung keluang, wisata bahari, pertanian rawa di Sabuai)	
						Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	
						Program Penyuluhan untuk diversifikasi	Diversifikasi tanaman hortikultura

Sumber: Hasil Analisis, 2016

5.2 Indikator Capaian Kegiatan

Indikator capaian kegiatan merupakan rangkaian rumusan yang menjadi standar baku untuk digunakan dalam menilai kegiatan berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, indikator capaian kegiatan ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan. Berikut indikator capaian masing-masing kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan agro-mina-wisata Kabupaten Kotawaringin Barat:

Tabel 5.2
Indikator Capaian Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat

Program	Kegiatan	Indikator Program / kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume					Satuan
				Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani	terdapat lima kali pendampingan petani untuk meningkatkan produktifitasnya	Semua Desa	6	6	6	6	6	orang
	Peningkatan penanganan pascapanen	terdapat dua kali penyuluhan yang dilaksanakan untuk 10 kelompok dalam kurun waktu dua tahun	Desa Sabuai dan Desa Sabuai Timur	10	10				kelompok
	penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk konsumsi padi lokal (Produk Sabuai dan Sabuai Timur)	terdapat satu kebijakan tentang kewajiban pemda Kobar mengkonsumsi padi lokal yang diaplikasikan	(konsumsi bagi masyarakat Kab. Kobar)	1					dokumen kebijakan
	membuka peluang pemasaran beras ciherang (organik) ke kota besar di Prov. Kalteng	terdapat dokumen penelitian pemasaran beras ciherang	Desa Sabuai	1	1				dokumen penelitian
	studi pengembangan tanaman ujung atap oleh P4S Karya Baru Mandiri	terdapat hasil studi tentang kesesuaian pengembangan tanaman ujung atap untuk Desa S.Bakau, dan Desa T.Bogam	Desa S.Bakau, Desa T.Bogam	1					dokumen
	studi pengembangan integrasi sapi-sawit oleh P4S Karya Baru Mandiri	terdapat sebuah hasil studi tentang kesesuaian pengembangan sapi-sawit untuk Desa S.Bakau, dan Desa T.Bogam	Desa S.Bakau, Desa T.Bogam, dan Keraya	1					dokumen
	pengadaan fasilitas fisik, dan sapi sebagai <i>pilot project</i>	terdapat hasil/dokumen penelitian tentang tanaman ujung atap	Desa S.Bakau, Desa T.Bogam, dan Keraya		3				unit
	penyuluhan untuk pengembangan tanaman ujung atap	terdapat penyuluhan bagi pelaku usaha tanaman ujung atap	Desa S.Bakau, Desa T.Bogam		1	1			Unit

Program	Kegiatan	Indikator Program / kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume					Satuan
				Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	
Program pengembangan perikanan tangkap	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas nelayan	terdapat keahlian nelayan dalam pengangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Semua Desa	6	6	6	6	6	orang
	pembangunan dermaga yang memiliki fungsi tambahan sebagai media bersosialisasi nelayan	tersedia lima dermaga pancang baru	Semua Desa	2	3				unit
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pembentukan dan monitoring Pokdarwis)	terbentuk satu kelompok sadar wisata di masing-masing desa di kawasan perdesaan.	semua desa	6	6	6	6	6	Kelompok
	studi analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata (domestik dan mancanegara)	terdapat studi kelayakan potensi yang dikembangkan sebagai prioritas tahun ke-3 hingga ke-5 pelaksanaan RPKP	semua desa	1					dokumen penelitian
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Agro	pembangunan gerbang masuk sebagai zona penerimaan	terbangun gerbang masuk kawasan perdesaan sebagai zona penerimaan wisata <i>ecotourism</i>	Sungai Bakau, Teluk Bogam			1	1		unit
	Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (integrasi sapi-sawit)	terdapat dua unit integrasi sapi-sawit di Desa Sungai Bakau dan Teluk Bogam	Teluk Bogam				1		unit
	Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (gosong beras basah)	terdapat wisata gosong beras basah di Desa Teluk Bogam	Kubu, Teluk Bogam, Sabuai			1	1		unit
	Pengembangan objek pariwisata untuk mancanegara (tanjung keluang, wisata bahari, pertanian rawa di Sabuai)	terdapat wisata panen padi menggunakan perahu sebagai atraksi wisata	Desa Kubu		1				unit
Program Penyuluhan untuk diversifikasi	Diversifikasi tanaman hortikultura	terdapat satu kali kegiatan penyuluhan tentang diversifikasi tanaman kepada tiga kelompok petani	Sungai Bakau, Teluk Bogam					3	kelompok

Sumber: Hasil Analisis, 2016

5.3 Kebutuhan Pendanaan

Kebutuhan pendanaan adalah keseluruhan biaya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program dan kegiatan. Sumber pendanaan ini dapat berasal dari beberapa sumber seperti Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat, maupun kerjasama dengan pihak lain. Berikut kebutuhan pendanaan masing-masing kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan agro-mina-wisata Kabupaten Kotawaringin Barat:

Tabel 5.3
Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat

Program	Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume Tahun Kke-					Satuan	Jumlah Dana Tahun ke- (Juta Rupiah)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat dan Bimbingan dan Pelatihan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam Pesisir	Sebuai dan Sebuai Timur	60	60	60	60	60	Org/ Tahun	60	60	60	60	60	APBD Kab	BPMD
	Penguatan kapasitas lembaga-lembaga termasuk pokdarwis, kelompok petani, dan kelompok nelayan	Semua Desa	18	18	6	6	6	Kelompok	150	150	50	50	50	APBD Kab	BPMD
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani	Semua Desa	6	6	6	6	6	orang	300	300	300	300	300	APBN	Kementerian Desa, PDT, & Trans
	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan (penanganan pascapanen)	Desa Sabuai dan Desa Sabuai Timur	10	10				kelompok	30	30				APBD Kab	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	Penyusunan kebijakan untuk konsumsi padi lokal (Produk Sabuai dan Sabuai Timur)	(konsumsi bagi masyarakat Kab. Kobar)	1					dokumen kebijakan	100					APBD Kab	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (dengan melibatkan swasta)	Desa Sabuai	1	1				dokumen penelitian	50	50				APBD Kab	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Program	Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume Tahun Kke-					Satuan	Jumlah Dana Tahun ke- (Juta Rupiah)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
	Studi pengembangan integrasi sapi-sawit oleh P4S Karya Baru Mandiri	Desa S.Bakau, Desa T.Bogam	1					dokumen	50					APBD Kab	P4S, Dinas Pertanian dan Peternakan
	Studi pengembangan tanaman ujung atap oleh P4S Karya Baru Mandiri	Desa S.Bakau, Desa T.Bogam, dan Keraya	1					dokumen	50					APBD Kab	P4S, Dinas Pertanian dan Peternakan
	Penyuluhan untuk pengembangan tanaman ujung atap	Desa S.Bakau, Desa T.Bogam, dan Keraya		3				unit		75				APBD Kab	Dinas Perkebunan
	Pengadaan fasilitas fisik, dan sapi sebagai pilot project	Desa S.Bakau, Desa T.Bogam		1	1			Unit		250	250			APBN	Kementerian Pertanian
Program pengembangan perikanan tangkap	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas nelayan	Semua Desa	6	6	6	6	6	orang	300	300	300	300	300	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Pembangunan dermaga yang memiliki fungsi tambahan sebagai media bersosialisasi nelayan	Semua Desa	2	3				unit	500	750				APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pembentukan Pokdarwis)	Semua desa	6	6	6	6	6	Kelompok	200	25	25	25	25	APBD Kab	Dinas Pariwisata; Swadaya
	Latihan Kepemanduan & Sertifikasi	Semua Desa	1	1	1			Kegiatan	150	150	150			APBN / APBD Kab	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan & Pariwisata
	Studi analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata (domestik dan mancanegara)	Semua desa	1					Dokumen Penelitian	150					APBD Kab	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Agro	Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (integrasi sapi-sawit)	Sungai Bakau, Teluk Bogam			1	1		unit			200	200		APBD Kab	Dinas Pariwisata
	Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (gosong beras basah)	Teluk Bogam				1		unit				200		APBD Kab	Dinas Pariwisata

Program	Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume Tahun Kke-					Satuan	Jumlah Dana Tahun ke- (Juta Rupiah)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
	Pengembangan objek pariwisata untuk mancanegara (tanjung keluang, wisata bahari, pertanian rawa di Sabuai)	Kubu, Teluk Bogam, Sabuai			1	1		unit			150	150		APBD Kab	Dinas Pariwisata
	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata (gerbang masuk sebagai zona penerimaan)	Desa Kubu		1				unit		500				APBD Kab	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Desa Wisata	Pelaksanaan Event Festival Desa Wisata Pesisir	1 (satu) lokasi / kegiatan gabungan dari 6 (enam) desa			1	1	1	Kegiatan			350	350	350	APBN/ APBD Kab/ APBDes/ Swadaya Masy	Kementerian Pariwisata; Dinas Kebudayaan & Pariwisata; 6 (enam) Desa/Swadaya
	Pembangunan Sistem Informasi Wisata	Kabupaten Kotawaringin Barat		1	1	1	1	Paket		100	100	100	100	APBN	Kementerian Pariwisata
Program Penyuluhan untuk Diversifikasi	Diversifikasi tanaman hortikultura	Sungai Bakau, Teluk Bogam					3	kelompok					600	APBD Kab	Dinas Pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Tabel 5.4.
Matriks Program dan Kegiatan Kawasan Perdesaan Agro-Mina-Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kebutuhan Intervensi	Program/ Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan	Volume	Program/ Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Lokasi	Volume *)					Satuan	Alokasi Dana (Juta Rupiah) *)					Sumber Dana *)	Instansi Pelaksana **)	Existing Outcomes	Expecting Outcomes
						Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5		Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)					(10)	(11)	(12)	(13)
A. PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA																				
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Agro																				
1	Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (integrasi sapi-sawit)	kegiatan baru	-	Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (integrasi sapi-sawit)	Sungai Bakau, Teluk Bogam			1	1		unit			200	200		APBD Kab	Dinas Pariwisata	Integrasi sapi-sawit saat ini hanya terdapat di Desa Kubu	Terdapat perluasan lokasi integrasi sapi-sawit di desa Sungai Bakau, dan Teluk Bogam
2	Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (gosong beras basah)	kegiatan baru	-	Pengembangan daerah tujuan wisata domestik (gosong beras basah)	Teluk Bogam				1		unit				200		APBD Kab	Dinas Pariwisata	Objek wisata Teluk Bogam memiliki prasarana yang terbengkalai	Wisata gosong beras basah di Desa Teluk Bogam menjadi tujuan wisata baru yang potensial menarik wisatawan domestik
3	Pengembangan objek pariwisata untuk mancanegara (tanjung keluang, wisata bahari, pertanian rawa di Sabuai)	kegiatan baru	-	Pengembangan objek pariwisata untuk mancanegara (tanjung keluang, wisata bahari, pertanian rawa di Sabuai)	Kubu, Teluk Bogam, Sabuai			1	1		unit			150	150		APBD Kab	Dinas Pariwisata	Lahan pertanian hanya digunakan sebagai lahan pertanian	Atraksi wisata panen padi menggunakan perahu di Desa Sabuai diminati wisatawan
4	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	kegiatan baru	-	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (gerbang masuk sebagai zona penerimaan)	Desa Kubu		1				unit			500			APBD Kab	Dinas Pariwisata	Sudah ada gerbang masuk namun desainnya mengganggu jalan kendaraan berlalu lintas	Terdapat zona penerimaan wisata ecotourism
B. PENERAPAN INOVASI UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING																				
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir																				
1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat (Bimbingan dan Pelatihan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam Pesisir)	kegiatan baru	-	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat dan Bimbingan dan Pelatihan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam Pesisir	Sebuai dan Sebuai Timur	60	60	60	60	60	Org/Thn	60	60	60	60	60	APBD Kab	BPMD	Penduduk belum memiliki kemampuan pengelolaan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam Pesisir	Penduduk memiliki kemampuan pengelolaan air bersih dan pelestarian Sumber Daya Alam Pesisir

No	Kebutuhan Intervensi	Program/ Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan	Volume	Program/ Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Lokasi	Volume *)					Satuan	Alokasi Dana (Juta Rupiah) *)					Sumber Dana *)	Instansi Pelaksana **)	Existing Outcomes	Expecting Outcomes
						Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5		Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)					(10)	(11)	(12)	(13)
2	Penguatan kapasitas lembaga-lembaga termasuk pokdarwis, kelompok petani, dan kelompok nelayan	kegiatan baru	-	Penguatan kapasitas lembaga-lembaga termasuk pokdarwis, kelompok petani, dan kelompok nelayan	Semua Desa	18	18	6	6	6	Kelompok	150	150	50	50	50	APBD Kab	BPMD	Kawasan Perdesaan belum memiliki kelembagaan	Kawasan Perdesaan memiliki kelembagaan yang mampu mengelola potensi kawasan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap																				
1	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas nelayan	kegiatan baru	-	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas nelayan	Semua Desa	6	6	6	6	6	orang	300	300	300	300	300	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Nelayan belum mendapat pendampingan cara tangkap ikan yang ramah lingkungan	Keahlian nelayan dalam pengangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan meningkat
2	pembangunan dermaga dan bangunan yang memiliki fungsi tambahan sebagai media peningkatan kapasitas nelayan	kegiatan baru	-	Pembangunan dermaga yang memiliki fungsi tambahan sebagai media bersosialisasi nelayan	Semua Desa	2	3				unit	500	750				APBN	Kementerian Perhubungan	Belum ada kegiatan pembangunan dermaga pancang di masing-masing desa di kawasan perdesaan	Terdapat dermaga pancang lima unit dimasing-masing desa
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan																				
1	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani	kegiatan baru	-	Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani	Semua Desa	6	6	6	6	6	orang	300	300	300	300	300	APBN	Kementerian Desa, PDT, & Trans	Petani belum mampu mengelola hasil panen dengan maksimal	Keahlian dan produktivitas petani meningkat
2	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan (penanganan pascapanen)	kegiatan baru	-	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan (penanganan pascapanen)	Desa Sabuai dan Desa Sabuai Timur	10	10				Kelompok	30	30				APBD Kab	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Kualitas beras belum baik, dan pecah-pecah, serta belum ada kegiatan promosi, dan tampilan pengemasan yang belum ada cap, masih berupa kantong plastik polos ukuran 10 Kg dan 20 Kg	Petani mampu menghasilkan beras organik kualitas baik dan mengemas beras organik secara menarik
3	Penyusunan kebijakan untuk konsumsi padi lokal (Produk Sabuai dan Sabuai Timur)	kegiatan baru	-	Penyusunan kebijakan untuk konsumsi padi lokal (Produk Sabuai dan Sabuai Timur)	(konsumsi bagi masyarakat Kab. Kobar)	1					Dokumen kebijakan	100					APBD Kab	Dinas Pertanian dan Peternakan	Sudah ada kebijakan untuk konsumsi padi lokal, namun baru himbuan	Warga Kobar mengkonsumsi beras organik Ciherang asal Sabuai dan Sabuai Timur
4	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (dengan melibatkan swasta)	kegiatan baru	-	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (dengan melibatkan swasta)	Desa Sabuai	1	1				Dokumen penelitian	50	50				APBD Kab	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Belum ada kegiatan promosi, dan tampilan pengemasan yang belum ada cap, masih berupa kantong plastik polos ukuran 10 Kg dan 20 Kg	Hasil produksi beras Ciherang telah dipasarkan di tingkat lokal pangkalan bungkai, hingga ke Jawa

No	Kebutuhan Intervensi	Program/ Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan	Volume	Program/ Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Lokasi	Volume *)					Satuan	Alokasi Dana (Juta Rupiah) *)					Sumber Dana *)	Instansi Pelaksana **)	Existing Outcomes	Expecting Outcomes
						Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5		Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)					(10)	(11)	(12)	(13)
5	Studi pengembangan integrasi sapi-sawit oleh P4S Karya Baru Mandiri	kegiatan baru	-	Studi pengembangan integrasi sapi-sawit oleh P4S Karya Baru Mandiri	Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam	1					Dokumen	50					APBD Kab	P4S, Dinas Pertanian dan Peternakan	Integrasi terbatas di Desa Kubu saja	Integrasi sapi-sawit di Desa S.Bakau, dan Desa T.Bogam
6	Studi pengembangan tanaman ujung atap oleh P4S Karya Baru Mandiri	kegiatan baru	-	Studi pengembangan tanaman ujung atap oleh P4S Karya Baru Mandiri	Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, dan Keraya	1					Dokumen	50					APBD Kab	P4S, Dinas Pertanian dan Peternakan	Penanaman tanaman ujung atap saat ini belum dikelola secara khusus	Terdapat pengembangan tanaman ujung atap
7	Penyuluhan untuk pengembangan tanaman ujung atap	kegiatan baru	-	Penyuluhan untuk pengembangan tanaman ujung atap	Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam, dan Keraya		3				unit		75				APBD Kab	Dinas Perkebunan	Tanaman ujung atap tumbuh secara alami dan masyarakat belum mengetahui cara pengembangan tanaman ujung atap	Penyuluhan bagi pelaku usaha tanaman ujung atap terselenggara
8	Pengadaan fasilitas fisik, dan sapi sebagai pilot project	kegiatan baru	-	Pengadaan fasilitas fisik, dan sapi sebagai pilot project	Desa Sungai Bakau, Desa Teluk Bogam		1	1			Unit		250	250			APBN	Kementerian Pertanian	Belum terdapat penelitian tentang cara penanaman	Dokumen penelitian tentang cara pengembangan tanaman ujung atap dapat dimanfaatkan petani
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																				
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pembentukan Pokdarwis)	kegiatan baru	-	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Pembentukan Pokdarwis)	Semua desa	6	6	6	6	6	Kelompok	200	25	25	25	25	APBD Kab	Dinas Pariwisata; Swadaya	warga desa belum mampu mengelola potensi wisata desa	Warga ikut serta dalam mengelola potensi wisata
2	Latihan Kepemanduan & Sertifikasi	kegiatan baru	-	Latihan Kepemanduan & Sertifikasi	Semua Desa	1	1	1			Kegiatan	150	150	150			APBN / APBD Kab	Kementerian Pariwisata; Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Belum memiliki jejaring pemasarandesa wisata serta manajemen pemasaran	Manajemen pemasaran dan jejaring pemasaran bersinergi berbasis teknologi

No	Kebutuhan Intervensi	Program/ Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan	Volume	Program/ Kegiatan yang akan Dilaksanakan	Lokasi	Volume *)					Satuan	Alokasi Dana (Juta Rupiah) *)					Sumber Dana *)	Instansi Pelaksana **)	Existing Outcomes	Expecting Outcomes
						Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5		Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)	(9)					(10)	(11)	(12)	(13)
3	Studi analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata (domestik dan mancanegara)	kegiatan baru	-	Studi analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata (domestik dan mancanegara)	Semua desa	1					Dokumen Penelitian	150					APBD Kab	Dinas Pariwisata	Saat ini dokumen perencanaan wisata ada di RIPPARDA	Pengembangan sektor wisata <i>ecotourism</i> mengacu pada RIPPARDA dan studi kelayakan tentang analisa pasar dan pengembangan objek wisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Desa Wisata																				
1	Pelaksanaan Event Festival Desa Wisata Pesisir	kegiatan baru	-	Pelaksanaan Event Festival Desa Wisata Pesisir	1 (satu) lokasi / kegiatan gabungan dari 6 (enam) desa			1	1	1	Kegiatan			350	350	350	APBN/ APBD Kab/ Alokasi Dana Desa / Swadaya Masyarakat	Kementerian Pariwisata; Dinas Kebudayaan & Pariwisata; 6 (enam) Desa/Swadaya	Masyarakat belum berperan aktif dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke desa wisata	Jumlah kunjungan wisatawan ke desa wisata meningkat
2	Pembangunan Sistem Informasi Wisata	kegiatan baru	-	Pembangunan Sistem Informasi Wisata	Kabupaten Kotawaringin Barat		1	1	1	1	Paket		100	100	100	100	APBN	Kementerian Pariwisata	Belum tersedia penanda destinasi wisata	Kemudahan bagi wisatawan untuk menuju destinasi wisata
Program Diversifikasi Tanaman																				
1	Penyuluhan tentang Diversifikasi tanaman hortikultura	kegiatan baru	-	Diversifikasi tanaman hortikultura	Sungai Bakau, Teluk Bogam					3	Kelompok					600	APBD Kab	Dinas Pertanian	Lahan gambut digunakan untuk menanam sawit dan sebagian besar berupa lahan belukar	Terdapat hasil diversifikasi tanaman

Sumber: Hasil Analisis, 2016

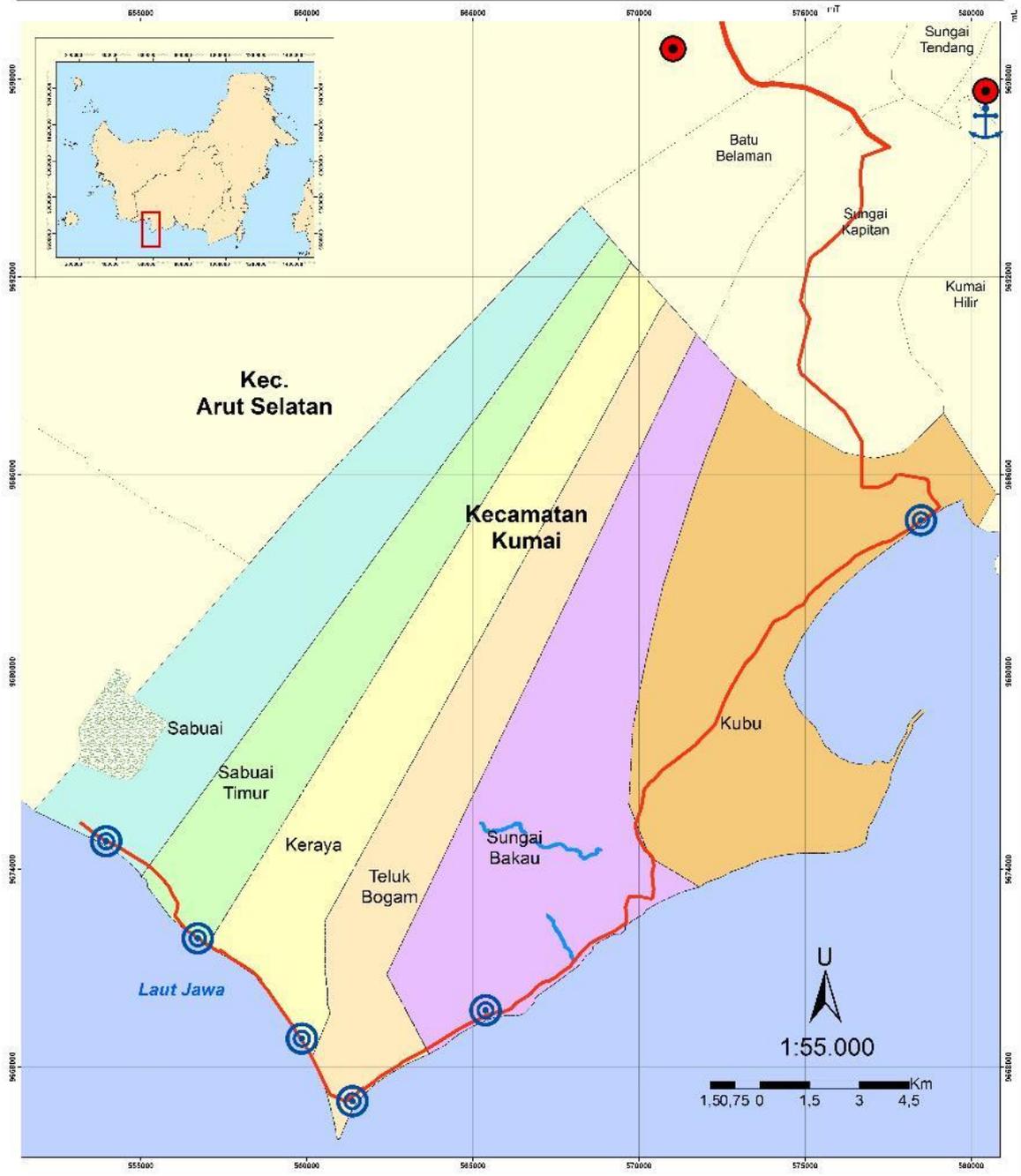
Keterangan :

*) Untuk selanjutnya direncanakan oleh TKPKP Kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan harga lokal

**) Instansi pelaksana menyesuaikan dengan peraturan tentang Perangkat Daerah serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing instansi

LAMPIRAN

PETA DELINIASI KAWASAN PERDESAAN AGRO-MINA-WISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Penyusunan Rancangan Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Wilayah III (Kalimantan)

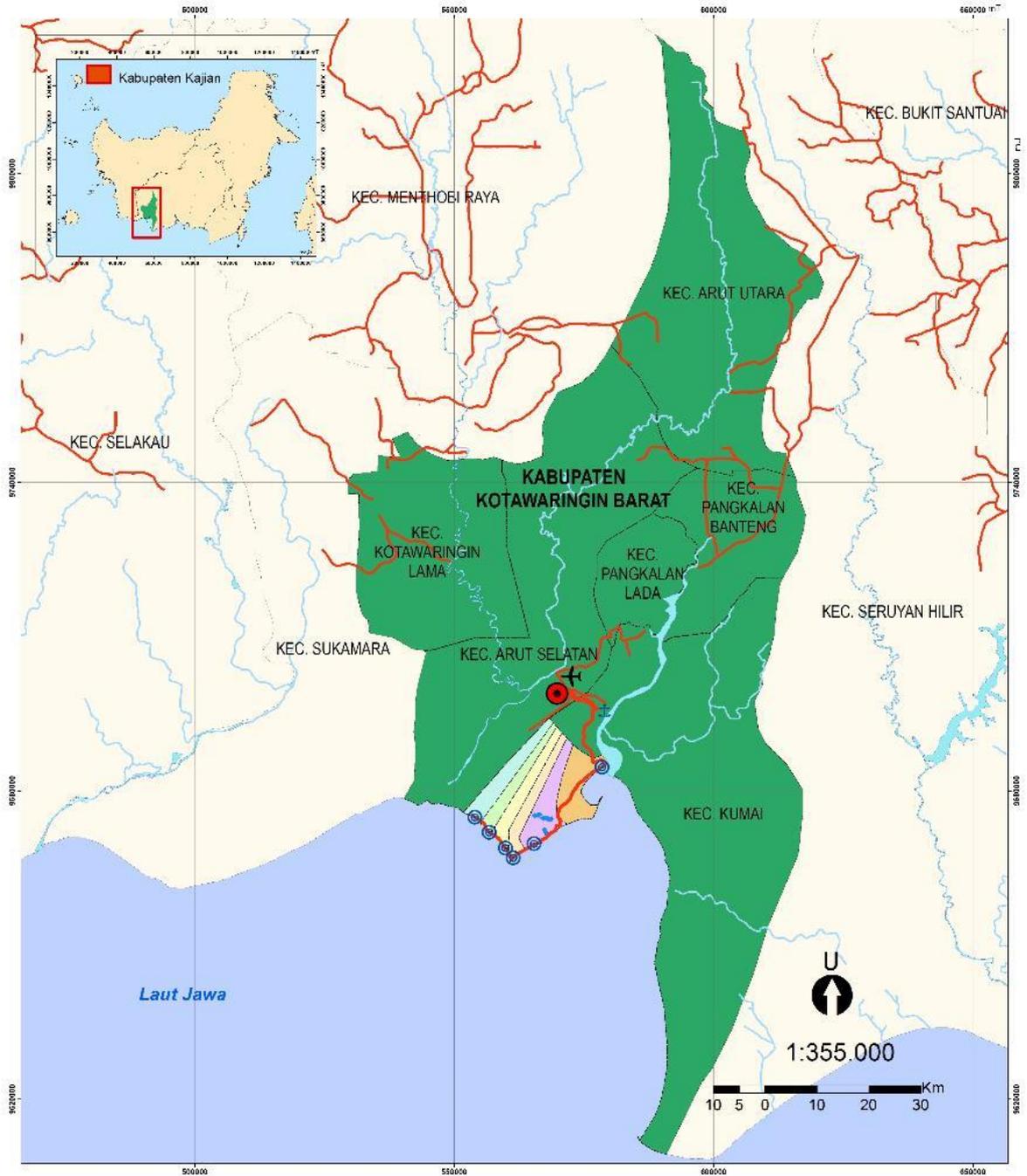
- Sumber:**
1. Peta Digital Wilayah Kalimantan
 2. Peta Digital Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
 3. Google satelit 2016
 4. Survey Lapangan September 2016
- Proyeksi:**
Sistem Proyeksi: UTM
Datum WGS 1984 Zona 49 M

Legenda:			
	Ibu Kota Kecamatan		Sungai
	Kantor Desa		Jalan Provinsi
	Bandara		Jalan Utama
	Pelabuhan		Jalan Desa
	Batas Kabupaten		Lahan Pertanian Padi
	Batas Kecamatan		

Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Republik Indonesia

PETA ORIENTASI LOKASI KAWASAN PERDESAAN AGRO-MINA-WISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III (Kalimantan)

- Sumber:**
1. Peta Digital Wilayah Kalimantan
 2. Peta Digital Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
 3. Google satelit 2016
 4. Survey Lapangan September 2016

Proyeksi:
Sistem Proyeksi: UTM
Datum WGS 1984 Zona 49 M

Legenda:

- | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|
| | Ibu Kota Kecamatan | | Sungai | | Batas Kabupaten | | Desa Keraya |
| | Kantor Desa | | Jalan Provinsi | | Batas Kecamatan | | Desa Sungai Bakau |
| | Bandara | | Jalan Utama | | Desa Teluk Bogam | | Desa Kubu |
| | Pelabuhan | | Jalan Desa | | | | Desa Sabuai |

Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional
Universitas Gadjad Mada
Yogyakarta

Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Republik Indonesia

USULAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sesuai hasil Rapat Usulan Penetapan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa / 30 Agustus 2016

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

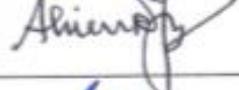
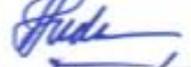
Telah disepakati Usulan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

Nama Kawasan Perdesaan	Desa	Kecamatan
Kawasan Perdesaan Berbasis Agropolitan, Minapolitan dan Pariwisata	1. Desa Kubu 2. Desa Sungai Bakau 3. Desa Teluk Bogam 4. Desa Keraya 5. Desa Sebuai Timur 6. Desa Sebuai	Kumai

Demikian kesepakatan dibuat sebagai bahan lebih lanjut.

Pangkalan Bun, 30 Agustus 2016

Pihak- pihak yang membuat kesepakatan,

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	Dede Kusriana	Bappeda	
2	Asa	BPMDes	
3	Rusdy SITA	Dinas Kelautan dan Perikanan	
4	Eka Mulyaningrum	Dinas Budaya dan Pariwisata	
5	MARTHWA M.R	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
6	Supardi	Camat Kumai	
7	MARWOTO	Camat Arut Utara	
8	H.A. Hudawati	Camat Arut Selatan	
9	Dede Marsus.	Camat Pangkalan Lada	

**KESEPAKATAN HASIL MUSYAWARAH PENGUSULAN
KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Sesuai hasil musyawarah pengusulan Kawasan Perdesaan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal Tiga Puluh Agustus Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kumai, telah disepakati usulan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

Nama Kawasan Perdesaan : **KAWASAN PERDESAAN AGROPOLITAN – MINAPOLITAN – PARIWISATA**

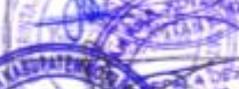
Terdiri dari desa-desa :

1. Desa Kubu
2. Desa Sungai Bakau
3. Desa Teluk Bogam
4. Desa Keraya
5. Desa Sbuai Timur
6. Desa Sbuai

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk ditindaklanjuti.

Kumai, 6 September 2016

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan:

No	Nama	Desa	Kecamatan	Tanda Tangan
1.	JERUMAI	Kubu	Kumai	
2.	Hj. SYAMSIAH	Sungai Bakau		
3.	JURHAN BERAY	Teluk Bogam		
4.	Pohy SRIAMAN	Keraya		
5.	AHMADI	Sbuai Timur		
6.	M. RUSLI	Sbuai		





BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 050/35/BAPP-I/2016**

T E N T A N G

**TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dipandang perlu membentuk/ menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. bahwa untuk lancarnya koordinasi dan optimalnya pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP);
- c. bahwa untuk pembentukan Tim tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
24. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 520/18/Bapp-III/2011 tanggal. 6 Juli 2011 tentang Penetapan Potensi Unggulan dan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
25. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 520/27/Bapp-III/2012 tanggal. 9 April 2012 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan kegiatan SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencapai keterpaduan/sinergitas dalam pelaksanaan Penetapan Kawasan Perdesaan;
 2. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 3. Menunjuk Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan
 4. Melaksanakan rapat koordinasi berkala dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, program/kegiatan di Desa Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- KETIGA** : Ditetapkannya Sub Tim Kawasan terdiri dari berbagai unsur element masyarakat, Dinas/SKPD, Lurah dan Kades yang dalam pelaksanaan tugasnya membantu Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilapangan (Lokus), sebagaimana lampiran II
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TKPKP Kabupaten Kotawaringin Barat, dibentuk Sekretariat TKPKP yang mempunyai tugas memberikan dukungan bahan kebijakan, dengan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi dimaksud bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEENAM** : Apabila selama tahun anggaran berjalan, terjadi mutasi/pergantian Pejabat di Instansi/Dinas/Unit Kerja, maka Pejabat Pengganti yang baru berfungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDELEPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Juli 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah
Cq. Kepala BPMPD Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
7. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
8. Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**NOMOR : 050 / 35 /BAPP-I/ 2016****TANGGAL : 25 Juli 2016****TENTANG : TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (TKPKP) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Kotawaringin Barat	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kab.Kotawaringin Barat	Ketua
3	Kepala Bappeda Kab. Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
4	Kepala BPMD Kab. Kotawaringin Barat	Sekretaris
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Kotawaringin Barat	Anggota
6	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Anggota
7	Staf Ahli Bidang Pembangunan	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
12	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Anggota
13	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Anggota
14	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
15	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
16	Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	Anggota
17	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
19	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota
20	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Dinas Perkebunan	Anggota
22	Kepala Dinas Kehutanan	Anggota
23	Kepala Dinas Sosial	Anggota
24	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
25	Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian	Anggota
26	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda	Anggota
27	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
28	Kepala Bagian Humas Setda	Anggota
29	Kepala Bagian Ekonomi Setda	Anggota
30	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**NOMOR : 050 / 35 / BAPP-I/ 2016****TANGGAL : 25 Juli 2016****TENTANG : TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (TKPKP)/SUB TIM KAWASAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
A. SUB TIM KAWASAN AGROPOLITAN		
1	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan	Koordinator
2	Kepala BPMD	Ketua
3	Kepala KP2KP	Wakil Ketua
4	Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Kotawaringin Barat	Sekretaris
5	Kabid Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Dinas Pertanian dan Peternakan	Anggota
6	Kabid Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kel. dan TTG BPMD	Anggota
7	Kasubid Rehabilitasi, Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Desa dan Kelurahan BPMD	Anggota
8	Kasubid Pertanian, Tamben dan Industri Bappeda	Anggota
9	Kasi Penerapan Teknologi Dinas Pertanian & Peternakan	Anggota
10	Camat Arut Selatan	Anggota
11	Camat Kotawaringin Lama	Anggota
12	Camat Pangkalan Lada	Anggota
13	Camat Pangkalan Banteng	Anggota
14	Camat Kumai	Anggota
15	Camat Arut Utara	Anggota
16	Badan Koordinasi Antar Desa Kec. Pangkalan Lada	Anggota
17	Badan Koordinasi Antar Desa Kec. Pangkalan Banteng	Anggota
18	Badan Koordinasi Antar Desa Kec. Arut Selatan	Anggota
19	Kepala Desa Natai Raya	Anggota
20	Kepala Desa Sulung	Anggota
21	Kepala Desa Tanjung Putri	Anggota
22	Kepala Desa Batu Belaman	Anggota
23	Kepala Desa Sebuai	Anggota
24	Kepala Desa Sungai Cabang	Anggota
25	Kepala Desa Amin Jaya	Anggota
26	Kepala Desa Kebun Agung	Anggota
27	Kepala Desa Sungai Hijau	Anggota
28	Kepala Desa Kadipi Atas	Anggota
29	Kepala Desa Pangkalan Tiga	Anggota
30	Kepala Desa Purbasari	Anggota
31	Kepala Desa Barambai Makmur	Anggota
B. SUB TIM KAWASAN MINAPOLITAN		
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator

2	Kepala BPMD	Ketua
3	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	Wakil Ketua
4	Kabid Ekonomi Bappeda Kab. Kotawaringin Barat	Sekretaris
5	Kabid Pengolahan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kabid Pembangunan Desa/Kel BPMD	Anggota
7	Kasubid Pertanian, Tamben dan Industri Bappeda	Anggota
8	Kasubid Pembangunan Desa dan Kelurahan BPMD	Anggota
9	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Camat Arut Selatan	Anggota
11	Camat Kotawaringin Lama	Anggota
12	Camat Pangkalan Lada	Anggota
13	Camat Pangkalan Banteng	Anggota
14	Camat Kumai	Anggota
15	Camat Arut Utara	Anggota
16	Badan Koordinasi Antar Desa Kecamatan Kumai	Anggota
17	Kepala Desa Bumi HARjo	Anggota
18	Kepala Desa Sungai Bedaun	Anggota
19	Kepala Desa Sungai Tendang	Anggota
20	Kepala Desa Kubu	Anggota
21	Kepala Desa Sungai Bakau	Anggota
22	Kepala Desa Teluk Bogam	Anggota
23	Kepala Desa Keraya	Anggota
24	Kepala Desa Sebuai Timur	Anggota
25	Kepala Desa Sebuai	Anggota
26	Kepala Desa	Anggota
27	Kepala Desa	Anggota
C.	SUB TIM KAWASAN PARIWISATA	
1	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koordinator
2	Kepala BPMD	Ketua
3	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Wakil Ketua
4	Kabid Sarpras Bappeda Kab. Kotawaringin Barat	Sekretaris
5	Kabid Pengembangan Objek Wisata Disbudpar	Anggota
6	Kabid Kelembagaan Sosbud dan Partipasi Masyarakat Desa/Kel BPMD	Anggota
7	Kasubid Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur Bappeda	Anggota
8	Kasubid Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat BPMD	Anggota
9	Kasi Pengembangan Peranserta Masyarakat Disbudpar	Anggota
10	Camat Arut Selatan	Anggota
11	Camat Kotawaringin Lama	Anggota
12	Camat Pangkalan Lada	Anggota
13	Camat Pangkalan Banteng	Anggota
14	Camat Kumai	Anggota
15	Camat Arut Utara	Anggota

16	Badan Koordinasi Antar Desa Kecamatan Arut Utara	Anggota
17	Badan Koordinasi Antar Desa Kecamatan Ktw.Lama	Anggota
18	Kepala Desa Kerabu	Anggota
19	Kepala Desa Panahan	Anggota
20	Kepala Desa Riam	Anggota
21	Kepala Desa Pandau	Anggota
22	Kepala Desa Sambu	Anggota
23	Kepala Desa Kubu	Anggota
24	Kepala Desa Sungai Bakau	Anggota
25	Kepala Desa Teluk Bogam	Anggota
26	Kepala Desa Keraya	Anggota
27	Kepala Desa Sebuai Timur	Anggota



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Bambang Purwanto
BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**NOMOR : 050 / 35 / BAPP-I/ 2016****TANGGAL : 25 Juli 2016****TENTANG : SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN (TKPKP) KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.**

No.	Nama	Jabatan Dalam Instansi Kerja	Jabatan Dalam Tim
1	Asap Mappeare, SE, BSc.	Kabid Pemerintahan dan Kesra Bappeda	Ketua
2	Romhendi, SIP	Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat BPMD	Sekretaris
3	Ir. Tri Joko	Kabid Statistik dan Litbang Bappeda	Anggota
4	Edy Darmawan Tharli, SE	Kasubid Litbang dan Statistik Bappeda	Anggota
5	Novita Susanti, SE	Kasubid Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
6	Rabudin Rumoga	Kasubid Pemerintahan dan Aparatur Bappeda	Anggota
7	Kusno	Kasubid Penguatan Kapasitas Pempdes dan Kelurahan BPMD	Anggota
8	Irfansyah, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program BPMD	Anggota
9	Wing Kentjanawati, SE.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan Bappeda	Anggota
10	Subardianto, SP.,MT.	Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program	Anggota
11	Jaleha, ST.	Pelaksana Subid Pemerintahan dan Aparatur	Anggota
12	Nur Dwi Jayanto, S.Si.	Pelaksana Subid Kesra	Anggota
13	Dessy Anggraeni Lestari, SE.	Pelaksana Bappeda	Anggota
14	Erna Tri Widyastuti, SE.	Pelaksana Bappeda	Anggota
15	Krisdianto Edy P, SE	Pelaksana Bappeda	Anggota
16	Nomie Hartati, ST	Pelaksana Bappeda	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

BAMBANG PURWANTO



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 050/ 37 /BAPP-I/2016

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang *Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32*);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
14. *Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008* tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (*Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14*);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32*);
16. *Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008* tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (*Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14*);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (*Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2*);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas *Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat* (*Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3*);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (*Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4*);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (*Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5*);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
24. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 520/18/Bapp-III/2011 tanggal. 6 Juli 2011 tentang Penetapan Potensi Unggulan dan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
25. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 520/27/Bapp-III/2012 tanggal. 9 April 2012 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Kabupaten Kotawaringin Barat.
26. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/35/Bapp-I/2016 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016,

KEDUA : Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan, Minapolitan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Kecamatan Kumai terletak di :

- 1) Desa Kubu;
- 2) Desa Sungai Bakau;
- 3) Desa Teluk Bogam;
- 4) Desa Keraya;
- 5) Desa Sebuai Timur;
- 6) Desa Sebuai.

KETIGA : Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kotawaringin Barat termuat dalam Peta Penetapan Lokasi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

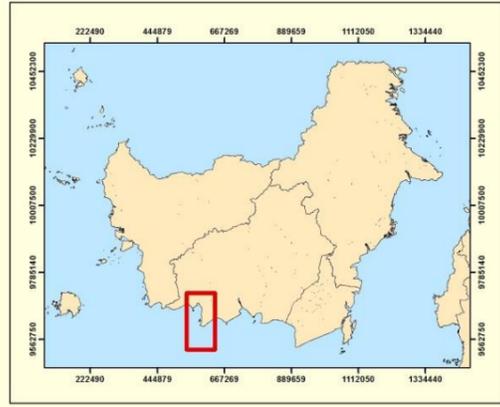
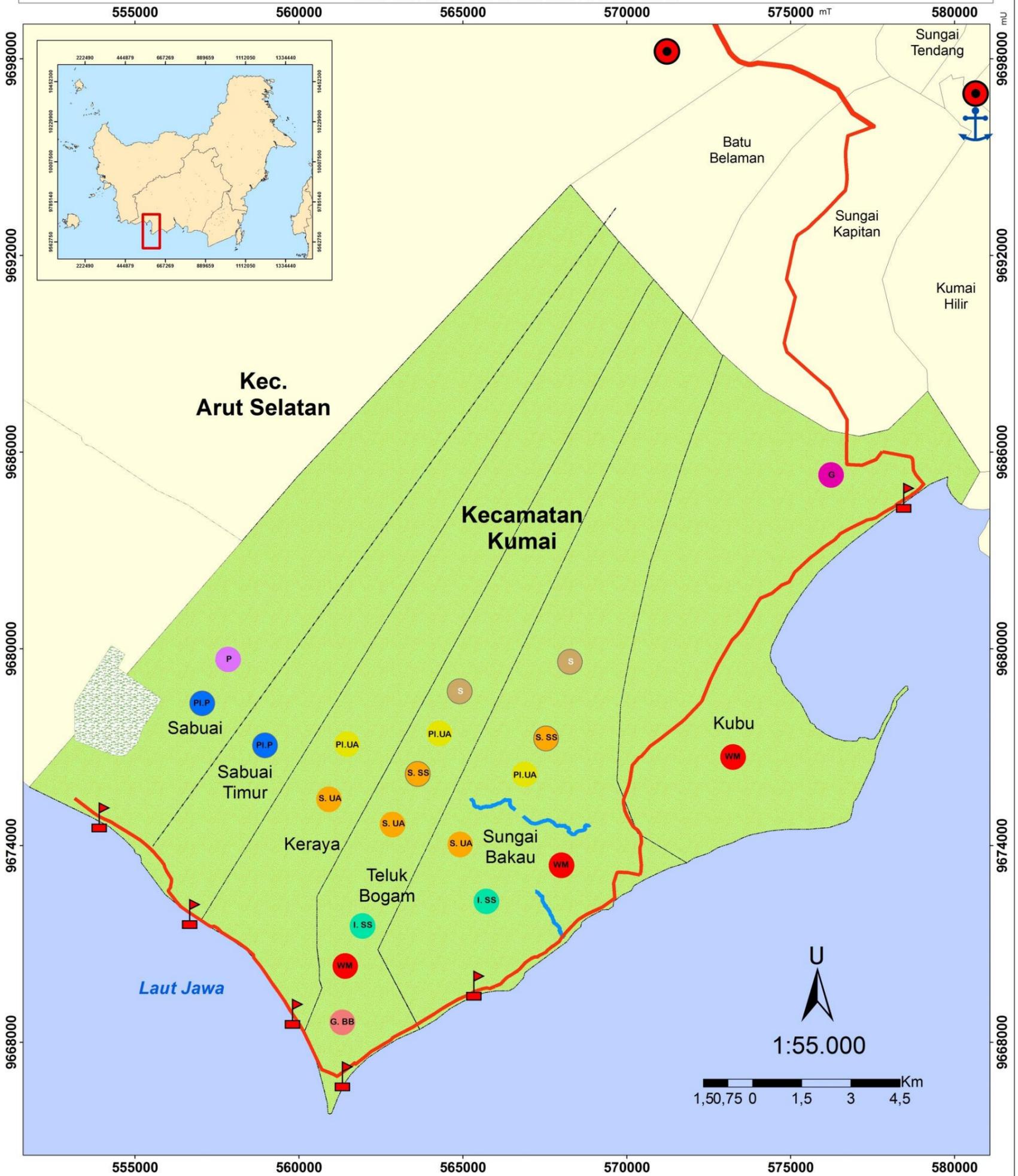


BAMBANG PURWANTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah
Cq. Kepala BPMPD Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
7. Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
8. Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.

**PETA INDIKASI LOKASI KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN AGRO-MINA-WISATA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III (Kalimantan)

- Sumber:**
1. Peta Digital Wilayah Kalimantan
 2. Peta Digital Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
 3. Google satelit 2016
 4. Survey Lapangan September 2016

Proyeksi:
Sistem Proyeksi: UTM
Datum WGS 1984 Zona 49 M

Legenda:

- Ibu Kota Kecamatan
- Kantor Desa
- Bandara
- Pelabuhan
- Sungai
- Jalan Provinsi
- Jalan Utama
- Jalan Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Lahan Pertanian Padi

Keterangan Kegiatan :

- Pengembangan wisata Gosong Beras Basah
- Pengembangan Wisata Mancanegara
- Pengembangan Integrasi Sapi-Sawit
- Studi Tanaman Ujung Atap
- Studi Integrasi Sapi-Sawit
- Penyuluhan Penanganan Pascapanen
- Penelitian Tanaman Ujung Atap
- Penelitian Pengembangan Pemasaran Beras Organik Sabuai
- Pembangunan Gerbang Penerimaan Wisata
- Pengadaan Sapi



*Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional
Universitas Gadjah Mada
(PSPPR UGM)*